

**Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Eks Karesidenan Surakarta
Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Aprilia Risti Juwita

Nomor Mahasiswa : 15313133

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

**Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Eks Karesidenan Surakarta
Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Aprilia Risti Juwita

Nomor Mahasiswa : 15313133

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Penulis,



METERAI
LEMBEL
6000
RUPIAH
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN
KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA

Aprifia Risti Juwita

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Karesidenan Surakarta Dalam
Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

Nama : Aprilia Risti Juwita

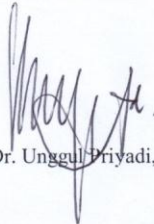
Nomor Mahasiswa : 15313133

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Desember 2018



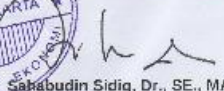

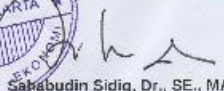
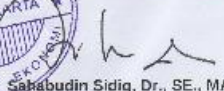
Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

	FAKULTAS EKONOMI	Gedung JICA Perintis Jl. H. Djojonegoro, Cendek, Depok Jember, Jember 55783 T. (0271) 881546/50.1000 F. (0271) 881549 E. fecon@uii.ac.id W. fecon.uii.ac.id
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI		
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>		
Pada Semester Ganjil 2018/2019, hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skrripsi yang disusun oleh:		
Nama	:	APRILIA RISTI JUWITA
No. Mahasiswa	:	15313133
Judul Tugas Akhir	:	EFISIENSI PENGELOLAAN PENDAPATAAN DAERAH KARESIDENAN SURAKARTA DALAM PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pembimbing	:	Unggul Priyadi, Dr., M.Si.
Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir/Skrripsi tersebut dinyatakan:		
1. Lulus Ujian Tugas Akhir ^{*)}		
-a. Tugas Akhir tidak direvisi		
-b. Tugas Akhir perlu direvisi		
2. Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir		
Nilai	:	... A
Referensi	:	Layak/Tidak Layak ^{*)} ditampilkan di Perpustakaan
Tim Penguji	:	
Ketua Tim	:	Unggul Priyadi, Dr., M.Si. 
Anggota Tim	:	Ari Rudatin, Dra., M.Si.
Surakarta, 16 Januari 2019 Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi  Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Keterangan: *) <i>Cover yang tidak perlu</i> - Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan Kuarszhensif, segera konfirmasi ke Divisi Akademik</div>		
		
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA		
FAKULTAS EKONOMI		
YOGYAKARTA		
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI		
Surakarta, 16 Januari 2019		
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi		
Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.		
		
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA		
FAKULTAS EKONOMI		
YOGYAKARTA		
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI		
Surakarta, 16 Januari 2019		
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi		
Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.		
		

MOTTO

“Wahai orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah: 154)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, dia telah menjadikan untuk sesuatu kadarnya”

(Q.S At-Talaq: 2-3)

“Berdoalah kamu sekalian pada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh”

(HR Tirmidzi)

“Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.” - Dale Carnegie

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilahirabbil'amin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT pemilik dari seluruh ilmu pengetahuan dan penguasa alam serta isinya, shalawat serta salam bagi Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Eks Karesidenan Surakarta Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat” sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya beberapa Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta yang memiliki tingkat efisiensi kurang dari 100%. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga saat ini.
2. Orang tua, Bapak Jumanto, Ibu Pertiwi, Terimakasih atas segala doa, perjuangan dan dukungan kalian yang tak pernah putus untuk terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Rahmat Novrianda, Terimakasih atas doa dan segala dukungan yang tak pernah lelah menemani dan membantu penulis dalam setiap prosesnya serta selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan kepeduliannya menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta nasihat-nasihat yang berguna bagi peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas bantuannya selama peneliti menjalankan perkuliahan.
9. Muchtar Hasan, Terimakasih telah menyediakan fasilitas dalam proses olah data DEA sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam proses skripsi.

Sebagai penutup, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta sebagai acuan dalam perbaikan pengalokasian dan pengelolaan pendapatan serta dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Penulis,

Aprilia Risti juwita

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Konsep Efisiensi	12
2.2.2. Efisiensi Sektor Publik	13
2.2.3. Pembangunan Ekonomi	14
2.2.3.1 Pembangunan Ekonomi Daerah	15
2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto	16
2.2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.2.4.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	18
2.2.5. Pendapatan Asli Daerah	20
2.2.5.1 Pajak Daerah.....	21
2.2.5.2 Retribusi Daerah	22

2.2.6.	Dana Perimbangan	23
2.2.6.1	Dana Bagi Hasil.....	24
2.2.6.2	Dana Alokasi Umum	24
2.2.6.3	Dana Alokasi Khusus	27
2.2.7.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	28
2.2.8.	Kemiskinan	29
2.2.9.	Indeks Pembangunan Manusia	30
2.3.	Kerangka Pemikiran Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis dan Sumber Data	35
3.2.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
3.3.	Metode Analisis dan Penelitian	37
3.4.	Nilai Manajerial DEA	38
3.5.	Formulasi DEA	39
3.6.	Keunggulan dan Kelemahan DEA	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Analisis Deskripsi	43
4.1.1	Produk Domestik Regional Bruto.....	43
4.1.2	Kemiskinan	45
4.1.3	Indeks Pembangunan Manusia.....	47
4.1.4	Pendapatan Daerah.....	49
4.1.4.1	Pendapatan Asli Daerah.....	49
4.1.4.2	Dana Perimbangan	50
4.1.4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	53
4.2.	Analisis Data dan Pembahasan	54
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI		
5.1.	Simpulan	71
5.2.	Implikasi	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 PDRB Menurut Kabupaten/ Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2017	44
Tabel 4.2 Presentase Penduduk Tidak Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	46
Tabel 4.3 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	48
Tabel 4.4 PAD Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	49
Tabel 4.5 Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	51
Tabel 4.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	53
Tabel 4.7 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	57
Tabel 4.8 Penggunaan Input yang Efisien pada Daerah Inefisiensi dan Pemborosan	59
Tabel 4.9 Penggunaan Output yang Efisien pada Daerah Inefisiensi dan Pemborosan.....	64
Tabel 4.10 Multiplier, Efisiensi dan Efficient Reference Set dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Variabel Input dan Output.....	76
Lampiran II Evaluasi Penggunaan Variabel Input	78
Lampiran III Evaluasi Penggunaan Variabel Output	79
Lampiran IV Hasil Olah Data Analisi <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i>	80

ABSTRAK

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada pengelolaan keuangan daerah, untuk itu efisiensi pengelolaan keuangan daerah diperlukan sehingga tidak terjadi pemborosan dan tepat sasaran dalam pengalokasiannya, hal ini dilakukan agar tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan pendapatan daerah Eks Karesidenan Surakarta dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, dan menggunakan variabel output yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung melalui PDRB, Presentase Penduduk Tidak Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini adalah, pada tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, diantaranya adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 berkurang menjadi dua daerah. Pada tahun 2016 adalah pada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen, sedangkan pada tahun 2017 adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci : *Data Envelopment Analysis (DEA)*, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang digerakkan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sadono (2012), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode tertentu.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono, 2012). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses usaha dan tindakan nyata pemerintah daerah bersinergi dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dalam implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah muncul, yaitu perencanaan terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan daripada memandang anggaran secara keseluruhan (World Bank, 2003). Menurut Sjafrizal (2014), analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar menentukan arah umum pembangunan daerah. Lebih lanjut, analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan sektor-sektor untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya, kemampuan untuk memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing ekonomi di wilayahnya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik daerah. Setiap pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam pencapaian tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus memiliki inisiatif pembangunan daerah dan menaksir potensi sumber daya- sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Efisiensi merupakan kunci yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat dikelola atau dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dengan harapan dapat meningkatkan hasil yang baik dalam tahapan pembangunan suatu daerah. Efisiensi pengeluaran pemerintah dapat tercapai jika hasil dari sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dalam pengalokasiannya dengan langkah strategis guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Kurnia, 2006).

Pemerintah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan deferensi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan kepada daerah itu sendiri sebagai imbas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/ 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menarik pungutan dan pajak, serta pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat melalui tinggi atau rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang diberikan oleh pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah sebesar kurang dari 30%, bahkan untuk Dati II lebih buruk lagi karena kurang dari 22% pengeluaran rutinnya dibiayai oleh PAD (Iskandar, 1993). Sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, salah satunya adalah Jawa tengah yakni Eks-Eks Karesidenan Surakarta, merupakan wilayah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Di Kota Surakarta, secara agregat realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 98,65%. Terdapat perbedaan anggaran dan realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 1.239,45 milyar rupiah, naik menjadi 1.385,11 milyar rupiah di tahun 2013. Dan pada tahun 2014 naik menjadi 1.525,58 milyar dan tahun 2015 naik sebesar 1.574,79 milyar. Demikian juga komponen DAU naik dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 sebesar 595,22 milyar rupiah dan pada tahun 2013 sebesar 659,65 milyar rupiah. DAU tahun 2014 sebesar 710,80 milyar. DAU tahun 2015 naik sebesar 713,3 milyar (BPS, 2016).

Pertumbuhan ekonomi wilayah eks Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,6%. Angka tersebut lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional atau Indonesia, yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,0%. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tidak sama, menurut Hirschman (1958) jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Daerah disuatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effects). Sedangkan jika perbedaan antara dua daerah tersebut semakin jauh maka terjadi proses pengkutubuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, desentralisasi daerah, efisiensi fiskal, dan peningkatan ekonomi Eks-Eks Karesidenan Surakarta, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi Pengelolaan Pendapatan**

Daerah Eks Karesidenan Surakarta Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat”

1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis tingkat efisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), penduduk tidak miskin, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis efisiensi pengelolaan pendapatan daerah di Eks Karesidenan Surakarta dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan informasi mengenai keberlangsungan suatu kebijakan publik sekaligus sumbangasih konseptual bagiperkembangan pada dunia ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah sebagai input

terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekaligus sebagai output, sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menentukan kebijakan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yanita Ega (2012). Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001-2008	Menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)	Melalui analisis DEA menunjukkan bahwa rata-rata kinerja sektor publik pada tahun 2008 di 33 propinsi di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2001, sedangkan rata-rata efisiensi sektor publik tahun 2008 justru mengalami peningkatan dibanding tahun 2001. Ini berarti ada indikasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia belum berdampak pada peningkatan kinerja sektor publik. Hasil analisis ini secara keseluruhan belum sejalan dengan pendapat para ahli fiskal federalism yang menyatakan bahwa dampak utama desentralisasi fiskal adalah meningkatnya kinerja dan efisiensi sektor publik.
2	Tri Wahyu (2017). Determinasi	Menggunakan pendekatan Data	Hasil dari penelitian ini terdapat tiga daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013 dan 2014 yang mengalami inefisiensi yaitu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Bali.	Envelopment Analysis (DEA)	Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar, sedangkan pada tahun 2015 terdapat lima daerah yang mengalami inefisiensi, bertambah dua daerah lain yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung yang tidak mencapai tingkat efisiensi relatif 100%
3	Hafizrianda, Y undy (2016). Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Papua :Suatu Penerapan Data Envelopment Analysis Di Sektor Pendidikan.	Menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)	Terdapat beberapa daerah yang teridentifikasi dapat efisien dalam melaksanakan tata kelola belanja di sektor pendidikan, misalkan Kabupaten Paniai, Mimika, Yahukimo, Keerom, Supiori, Intan Jaya dan Kota Jayapura. Fenomena ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sektor pendidikan di Provinsi Papua berlangsung sangat tidak konsisten dan tidak terintegrasi antarwaktu.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Neneng Erlina (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan).	Menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)	Efisiensi teknis biaya bidang pendidikan yang konsisten adalah Kecamatan Batu Lanteh, sedangkan daerah yang sudah mencapai kondisi efisien dalam teknis sistem adalah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Maronge. Adapun daerah yang mencapai kondisi efisien dalam teknis biaya bidang kesehatan selama periode penelitian secara konsisten adalah Kecamatan Lantung, dalam teknis sistem adalah Kecamatan Maronge, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Utan dan Kecamatan Alas Barat.
5	Merini D. (2012). Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Kawasan Asia Tenggara.	Menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Singapore mejadi negara yang tingkat efisiensinya secara rata-rata tertinggi di ketiga sektor, sementara Malaysia mengalami inefisiensi paling parah, negara berpenghasilan menengah keatas cenderung memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi pada sektor publik sehingga tidak efisien adapun negara tersebut yaitu Malaysia, Brunein Darussalam dan Vietnam, sedangkan negara dengan kategori miskin seperti Cambodia dan Laos

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			meskipun memiliki tingkat efisien yang relative tinggi tetapi dalam pelayanan publiknya masih buruk.
6	R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarmo (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	Menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis)	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggaran 2010 sampai 2014 sudah sangat baik. Sedangkan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu alokasi pengeluaran sektor publik yang berasal dari input pendapatan suatu wilayah yang digunakan untuk

sebuah pembangunan wilayah baik ekonomi maupun kesejahteraan sebagai output dengan metode DEA dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi di masing-masing wilayah berbeda, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan input di masing-masing wilayah begitupun dalam pengalokasiannya untuk menghasilkan output. Selain efisiensi, terdapat juga inefisiensi yang terjadi dengan menggunakan metode dalam penelitian-penelitian tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode tersebut dapat mengevaluasi kinerja dan pengalokasian dana input terhadap output yang didapatkan. Metode DEA juga memberikan capaian atau target yang seharusnya dimiliki oleh daerah dengan tingkat efisiensi dibawah 100% dan menampilkan pemborosan dari input serta menampilkan kenaikan yang harus dicapai untuk output agar mencapai efisiensi relatif 100%. Penelitian ini merujuk pada penelitian Yanitra Ega (2012) yaitu Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001-2008. Perbedaannya adalah pada obyek yang diteliti, dimana pada penelitian ini akan meneliti pengelolaan pendapatan daerah di Eks Karesidenan Surakarta, sedangkan penelitian oleh Yanitra Ega meneliti 33 provinsi di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Efisiensi

Efisiensi adalah proses ketepatan dalam menjalankan sesuatu atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik artinya tidak membuang waktu, tenaga, biaya, kedayagunaan dan ketepatangunaan yang berlebih. Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara output dengan input

yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan (Saputra, 2011). Farrell (1957) membagi makna efisiensi menjadi dua komponen, yaitu: efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis didefinisikan sebagai kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dari serangkaian input dan teknologi yang telah ditentukan. Saputra (2011) mendefinisikan efisiensi teknis sebagai kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk menghasilkan output maksimum yang mungkin dari

2.2.2 Efisiensi Sektor Publik

Dalam penyediaan sektor publik perlu adanya efisiensi. Efisiensi sektor publik adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan keuangan daerah secara akurat dan optimal untuk menghasilkan sejumlah output atau layanan publik. Disediaknya sektor publik yaitu dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

Menurut Kuhry and van der Torre (2002) dalam Ismail, Adham (2004), sektor publik secara legal definition meliputi organisasi pemerintah dan organisasi yang tunduk pada hukum publik. Dalam pengertian ini sektor publik termasuk organisasi yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai dari anggaran negara. Dalam penyempurnaan pengukuran efisiensi sektor publik yang lebih akurat, menurut Thompson Assifie (2004) dalam Ismail, Idham (2009) menyatakan bahwa dalam penetapan kriteria efisiensi kepada sektor publik tergantung kepada dua hal yaitu : Pertama, tingkat kejelasan (clarity) dan keterukuran (measurability) dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai; dan Kedua, sejauh mana hubungan sebab akibat dalam proses organisasional dapat diketahui.

2.2.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu : aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan

perbaikan dibidang regulasi (baik legal formal maupun informal) (Arsyad, Lincoln 1999).

Para ekonom mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk atau perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural). Menurut Rostow dalam Arsyad (2004), proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisonal (the traditional society), prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take off), tinggal landas (the take-off), menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption).

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan orientasi pada bidang ekonomi, politik, dan sosial yang berorientasi pada suatu daerah. Dalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi yang diinginkan maka pembangunan harus terfokus pada tiga hal pokok, antara lain yaitu meningkatkan ketersediaan dan pengoptimalan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. (Todaro, 2004)

2.2.3.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan perusahaan baru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Adisasmita (2009) mengatakan bahwa pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam. Tenaga kerja dan SDM. Investasi modal. Prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri. Teknologi. Situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. Kewirausahaan kelembagaan dan lingkungan pembangunan secara luas.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

2.2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad Lincoln 1999). Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan

ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono 2012).

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam. Dan tingkat teknologi yang digunakan (Sadono, 1958).

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB, tetapi juga diukur dari immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999)

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dalam perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Dalam pertumbuhan ekonomi ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat pendapatan perkapita yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan melalui 2 aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total mempunyai 3 unsur pokok sistem produksi meliputi, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani, dan stok barang modal yang ada. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pendapatan lebih dari masyarakat pada periode tertentu. Dan juga indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian suatu negara (Susanti, 2013).

2.2.4.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi suatu negara di ukur oleh dua indikator utama yaitu PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional. Istilah PDRB merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan

PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. Menurut Oktaviana Dewi (2012) PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak daerah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), diantaranya adalah :

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Peningkatan PDRB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.

3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestic).

Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauhmana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestic.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah tersebut. Menurut undang-undang no.28 tahun 2009, Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapatkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah (Mardiasmo 2002:132). Pendapatan asli daerah yang tinggi belum tentu menjadi jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah tersebut. Namun, tingginya PAD dapat menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam pengembangan wilayah daerah tersebut dengan menggunakan PAD sebagai sumberdaya.

Undang undang No. 32 tahun 1956 menetapkan sumber sumber keuangan daerah sebagai berikut (Kristiadi 1991):

1. pendapatan asli daerah (PAD):

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah meliputi pajak verponding, pajak verponding indonesia, pajak rumah tangga,

pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra dan pajak pembangunan.

2. sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak matrial, pajak kekayaan dan pajak perseroan.

3. ganjaran, subsidi dan bantuan, diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu.

2.2.5.1 Pajak Daerah

Pemerintah daerah memerlukan sumber fiskal dalam memenuhi tanggung jawab pertumbuhan daerahnya. UU No. 25/1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan nasional tetapi tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah (Adisasmita, 2011).

Jenis pajak daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis, seperti pajak hotel dan restoran, pajak iklan, pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, dan retribusi lain-lain.

Terdapat perubahan antara UU No. 18 Tahun 1997 dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah (Simanjuntak, 2003) :

1. Di Provinsi terdapat perluasan PKB dan BBNKB menjadi PKB dan BBNKB yang memasukkan kendaraan diatas air
2. Di Provinsi penambahan jenis pajak dengan pajak engambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang sebelumnya merupakan pajak kabupaten / kota.
3. Dibedakannya pajak hotel denga pajak restoran untuk kabupaten/kota yang sebelumnya dijadikan satu.
4. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk kabupaten/kota yang diubah menjadi pajak pengambilan bahan galian golongan C
5. Penambahan pajak parkir sebagai sumber penerimaan pajak baru
6. Kabupaten/kota diberikan keleluasaan dalam penambahan jenis pajak baru dengan kriteria yang harus diikuti.

2.2.5.2 Retribusi Daerah

Menurut Adisasmitha (2011) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran tersebut. Menurut Ahmad Yani (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau instansi terkait

Terdapat sifat atau ciri-ciri retribusi menurut Haritz (1995) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budget airnya (penerimaannya) tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

Retribusi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

2.2.6 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, Dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam)
2. Dana Alokasi Uumum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.2.6.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kurangnya sumber pajak. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas :

1. Penerimaan pajak
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (BPHTB)
 - c. PPh Orang Pribadi
2. Penerimaan bukan pajak (SDA)
 - a. Sektor kehutanan
 - b. Sektor pertambangan umum
 - c. Sektor minyak bumi dan gas alam
 - d. Sektor perikanan

2.2.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum atau yang biasa disebut DAU adalah transfer dana antar pemerintah dari pusat ke kabupaten/kota. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fisiknya, dan didistribusikan dengan formula

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebihbanyak daripada daerah kaya.

Tujuan adanya DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU

Secara definisi, Dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003) :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

Panitia anggaran DPR-RI dengan pemerintah tanggal 10 juli 2002, menetapkan penyempurnaan fomula dan perhitungan DAU dilakukan dengan :

1. Meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan

2. Mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam AM dan memperbear porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam PP 84/2001)
3. Diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima DAU TA 2003 kurang dari atau minimal sama dengan DAU plus dana penyeimbang TA 2002. Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui dana penyeimbang TA 2003.

Formula DAU tahun anggaran 2003 berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2001 adalah sebagai berikut (Sidik, 2003) :

$$\mathbf{DAU_i} = \mathbf{AM} + \mathbf{KF}$$

$$\mathbf{AM} = \mathbf{LS} + \alpha \mathbf{Gaji}$$

$$\mathbf{KF_i} = \mathbf{Bdi} \times \mathbf{DAU_n}$$

$$\mathbf{BDi} = \frac{(\mathbf{KbF} - \mathbf{KpF})_i}{(\mathbf{KbF} - \mathbf{KpF})_n}$$

Keterangan :

DAU_i : Dana alokasi umum provinsi atau kabupaten/kota

DAU_n : Dana alokasi umum seluruh provinsi atau kabupaten/kota

AM : Alokasi minimum

KF : Kesenjangan fiskal

BD : Bobot daerah

LS : Lumpsum

α Gaji : Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji

KbF : Kebutuhan fiskal dari provinsi atau kabupaten/kota

KpF : Kapasitas fiskal dari provinsi atau kabupaten/kota

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 25/1999, plafon DAU ditetapkan sekurang kurangnya 25% dari PDN dalam APBN. Dalam praktek dirinci menjadi :

1. Dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan rasio 10% provinsi dan 90% kabupaten/kota. (pasal 7 ayat (2) UU No. 25/1999)
2. Dalam implementasinya, plafon DAU untuk provinsi (10%) lebih kecil dari kebutuhan DAUnya. Kenyataannya, plafon DAU TA 2002 provinsi (10%) sebesar Rp. 6.911,41 miliar ternyata lebih kecil dibandingkan DAU provinsi TA 2001 ditambah dana kontinjensi yang mencapai Rp. 7.465,46 miliar.

2.2.6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan suatu dana yang ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih dan untuk tujuan khusus yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya yang sekaligus merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi :

1. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi

3. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir/ kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan melalui dana PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lai-lain penerimaan yang sah
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari dana reboisasi)
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait

Berdasarkan PP 104/2000 DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan

2.2.7 Lain - lain Pendapatan yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

2.2.8 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Dalam pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi :

1. Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan
2. Sumber keuangan
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial
4. Jaringan sosial
5. Pengetahuan dan ketrampilan
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004).

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235). Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2016).

Terdapat beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantaranya adalah :

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir - Life Expectancy (e_0)

Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2. Rata-rata Lama Sekolah - Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah - Expected Years of Schooling (EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah

yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Purchasing power parity (PPP)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran

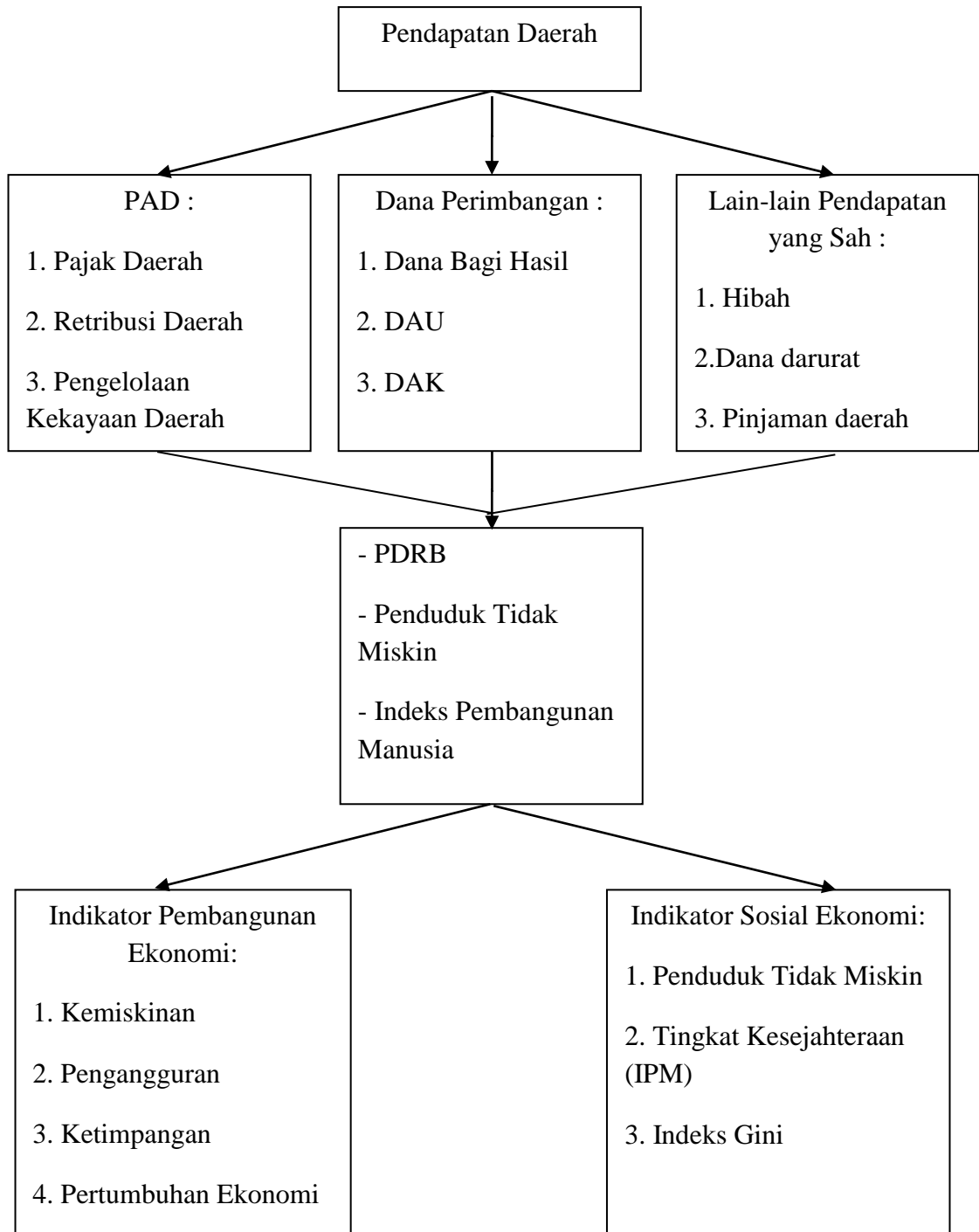
$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.

- Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.
- Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM_t = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100 \%$$

2.3 Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, dan menggunakan variabel output yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung melalui PDRB, Presentase Penduduk Tidak Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan. Variabel input adalah variabel yang berasal dari pendapatan daerah yang dialokasikan ke sektor publik untuk menghasilkan output (Pembangunan Ekonomi). Variabel output sendiri merupakan capaian dari suatu pembangunan ekonomi yang berasal dari input pada setiap daerah. Setelah dilakukan operasi melalui metode DEA maka tingkat efisiensi dan inefisiensi ditampilkan dari hasil olah data variabel input serta data variabel output pada masing-masing daerah, kemudian akan disimpulkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan beberapa input terhadap output yang dihasilkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan tahunan yang ada di daerah setempat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa instansi atau sumber-sumber lain. Adapun data yang digunakan antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

A. Variabel Input

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Pendapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Variabel Output

1. Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan

Kondisi dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sehingga mengancam mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam konsumsi, mendapatkan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu pencapaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

3.3 Metode Analisis dan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Data Envelopment Analysis (DEA). DEA adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengetahui efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. DEA menghitung ukuran efisiensi secara skalar dan menentukan level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Metode DEA diciptakan sebagai alat evaluasi kinerja suatu aktivitas di sebuah unit entitas (organisasi) yang selanjutnya disebut Decision Making Unit (DMU). Secara sederhana, pengukuran ini dinyatakan dengan rasio output/input, yang merupakan suatu pengukuran efisiensi atau produktivitas.

Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (total

weighted output / total weighted input. Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat, diantaranya adalah :

1. tidak bernilai negatif
2. bersifat universal ;

artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output / total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output / total weighted input ≤ 1).

3.4 Nilai Manajerial DEA

Teori DEA memiliki beberapa konsep nilai yang digunakan sebagai dasar proses manajerial yaitu (PAU UGM, 2000) :

- a. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial atau yang membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan UKE yang tidak/kurang efisien
- b. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai $<100\%$. jika suatu UKE kurang efisien (efisien $< 100\%$) maka DEA dapat menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda

(multipliers) yang dapat digunakan oleh Instansi untuk menyusun strategi perbaikan atau angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.

- c. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit kegiatan ekonomi (UKE) efisiensi dengan input berbeda dan menghasilkan output yang berbeda dengan unit kegiatan ekonomi (UKE) yang lain

3.5 Formulasi DEA

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode DEA. Misalkan, kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n . Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Misal $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE_j dan misalkan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE_r . Variabel keputusan (decision variable) dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE_k . V_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh unit kegiatan k dan U_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k . Sehingga V_{ik} dan U_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui interaksi program linear fraksional (*fractional linear programs*), suatu formulasi program linear untuk setiap UKE dalam sampel. Fungsi tujuan (*objective function*) dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut (PAU UGM, 2000) :

$$\text{Memaksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan UKE k untuk memiliki bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada satu UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar 1 atau 100%, jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE k sehingga formulasi selanjutnya adalah:

$$\frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$$U_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

Program linear fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam program linear biasa (*ordinary linear program*), dan metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Transformasi program linear, yang disebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), adalah sebagai berikut:

$$\text{DEA memaksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan atau kendala :

$$[P_{kj}] \quad \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ij} \leq 0 ; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} = 1$$

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 ; i = 1, \dots, m$$

Rumus diatas mengasumsikan kedua teknologi Constan return to scale

dimana :

Y_{rk} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor k

X_{ik} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor k

Y_{rj} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor j

X_{ij} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor j

s = Jumlah sektor yang dianalisis

m = Jumlah input yang digunakan

V_{ik} = Bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap sektor k

Z_k = Nilai yang dipotimalkan sebagai indikator efisien relatif dari sektor k

3.6 Keunggulan dan Kelemahan DEA

Dari uraian mengenai konsep Data Envelopment Analysis di atas, dan menurut Dr. Tim dalam Erwinta dan Nugroho (2005), maka terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan metode DEA, diantaranya adalah :

A. Keunggulan

1. DEA dapat menangani pengukuran efisiensi secara relatif beberapa UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) sejenis dengan menggunakan banyak input dan output.
2. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi secara spesifik sehingga diperoleh informasi secara rinci pada masing-masing UKE
3. DEA dapat memberi arah pada UKE yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensinya melalui kegiatan benchmarking terhadap UKE yang efisien (Efficient Reference Set).
4. Dengan metode DEA, tidak perlu mencari asumsi bentuk fungsi hubungan antara variabel input dan output dari UKE sejenis yang akan diukur efisiensinya
5. Faktor input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari kedua variabel tersebut.

B. Kelemahan

1. Karena DEA merupakan sebuah *extremepoint technique*, kesalahan-kesalahan pengukuran dapat mengakibatkan masalah yang signifikan.
2. DEA hanyalah menunjukkan perbandingan baik buruk apa yang telah dilakukan sebuah UKE dibandingkan dengan sekumpulan UKE sejenis (relatif).
3. Karena DEA adalah teknik non parametrik, uji hipotesis secara statistik sulit dilakukan

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi

Untuk memberikan ilustrasi besaran variabel yang diteliti, dilakukan perhitungan secara deskriptif, yang mencakup perhitungan nilai rata-rata dan nilai tertinggi ataupun terendah. Dalam menganalisa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari pendapatan regional. Perekonomian suatu daerah dapat diukur dari beberapa indikator yaitu, pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan oleh jumlah penduduk suatu daerah yang tergolong tidak miskin, serta tingkat pembangunan manusia berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di suatu daerah.

4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Eks Karesidenan Surakarta

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB		
	2015	2016	2017
Boyolali	18.170.384.000	19.132.556.000	20.188.699.710
Klaten	22.558.976.000	23.717.931.000	24.920.302.860
Sukoharjo	21.612.078.000	22.845.983.000	24.152.939.480
Wonogiri	16.977.199.000	17.865.345.000	18.788.397.760
Karanganyar	21.286.287.140	22.428.803.800	23.665.952.050
Sragen	21.390.871.000	22.618.321.660	23.933.252.170
Surakarta	28.453.494.000	29.966.373.000	31.562.980.460
Rata-rata	21.492.755.591	22.653.616.209	23.887.503.499

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Berdasarkan data yang diperoleh seperti pada tabel 4.1, merupakan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Diketahui bahwa PDRB di Eks Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2015-2017. Kota Surakarta merupakan daerah dengan PDRB tertinggi di daerah Eks Karesidenan Surakarta. Pada tahun 2015 PDRB Kota Surakarta mencapai Rp.28.453.494.000.000, pada tahun 2016 mencapai Rp.29.966.373.000.000, kemudian pada tahun 2017 mencapai Rp. 31.562.980.460.000. PDRB tinggi dikarenakan tingginya pendapatan pada sektor konstruksi, kemudian diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 disektor konstruksi, Kota Surakarta berturut-turut menyumbang pendapatan sebesar Rp.7.390.395.310.000, Rp. 7.865.547.960.000, dan Rp.8.255.938.750.000. Kemudian pada sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang pendapatan terbesar kedua yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.6.730.422.130.000, pada tahun 2016 sebesar Rp.7.036.700.290.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.7.415.193.590.000. Daerah dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Wonogiri, yaitu sebesar Rp. 16.977.199.000.000 pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 sebesar 17.865.345.000 dan diikuti dengan tahun 2017 sebesar Rp. 18.788.397.760.

Rata-rata PDRB di Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2015 adalah Rp. 21.492.755.591 kemudian pada tahun 2016 adalah Rp. 22.653.616.209 dan tahun 2017 sebesar Rp. 23.887.503.499. Dari rata-rata tersebut masih terdapat beberapa kabupaten yang PDRBnya dibawah rata-rata, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Namun pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Sragen melebihi dari PDRB rata-rata yaitu sebesar Rp. 23.933.252.170

4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu problematika dalam sistem perekonomian yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan

sosial politik. Tingkat kemiskinan merupakan acuan dari tingkat pembangunan ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin baik tingkat pembangunan ekonomi.

Tabel 4.2
Presentase Penduduk Tidak Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Tidak Miskin		
	2015	2016	2017
Boyolali	87,55	87,91	88,04
Klaten	85,11	85,54	85,85
Sukoharjo	90,74	90,93	91,25
Wonogiri	87,02	86,88	87,01
Karanganyar	87,54	87,51	87,72
Sragen	85,14	85,62	85,98
Surakarta	89,11	89,12	89,35
Rata-rata	87,46	87,64	87,88

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa setiap tahun Kabupaten atau Kota di Eks Karesidenan Surakarta mengalami penurunan presentase penduduk miskin, terkecuali pada Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yaitu dapat dilihat dari penurunan presentase penduduk tidak miskin sebesar 86,88 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 87,02. Tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kabupaten Sukoharjo dilihat berdasarkan presentase penduduk tidak miskin yang terbanyak pada daerah tersebut yaitu sebesar 90,74% pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 sebesar 90,93% dan pada tahun 2017 sebesar 91,25%. Sedangkan

tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Klaten. Berdasarkan presentase penduduk tidak miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebesar 85,11%, kemudian pada tahun 2016 sebesar 85,54% dan pada tahun 2017 sebesar 85,85%.

Telah dipaparkan juga rata-rata dari presentase penduduk tidak miskin. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masih banyak daerah di Eks Karesidenan Surakarta yang presentase penduduk tidak miskinnya dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan presentase penduduk tidak miskin dibawah rata-rata yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 terdapat empat Kabupaten yaitu, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berikut data IPM di Eks Karesidenan Surakarta :

Tabel 4.3
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	IPM		
	2015	2016	2017
Boyolali	71,74	72,18	72,64
Klaten	73,81	73,97	74,25
Sukoharjo	74,53	75,06	75,56
Wonogiri	67,76	68,23	68,66
Karanganyar	74,26	74,9	75,22
Sragen	71,10	71,43	72
Surakarta	80,14	80,76	80,85
Rata-rata	73,32	73,73	74,53

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Berdasarkan data pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 IPM di Eks Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan. Daerah tertinggi capaian IPM terdapat pada Kota Surakarta. Pada tahun 2015 IPM Kota Surakarta sebesar 80,14, kemudian pada tahun 2016 sebesar 80,76 dan pada tahun 2017 IPM mencapai 80,85. Sedangkan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Wonogiri, yaitu pada tahun 2015 sebesar 67,76, kemudian pada tahun 2016 sebesar 68,23 dan pada tahun 2017 sebesar 68,66. Terdapat beberapa daerah yang mempunyai IPM dibawah rata-rata. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Kabupaten Boyolali, Wonogiri dan Sragen berturut-turut memiliki IPM dibawah rata-rata

4.1.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	PAD		
	2015	2016	2017
Boyolali	260.633.637,93	292.310.032,23	388.014.880,21
Klaten	190.622.670,128	224.197.408,481	371.718.439,306
Sukoharjo	313.947.492	363.163.428	464.567.410
Wonogiri	211.208.601,2	218.604.854,6	333.840.434,9
Karanganyar	218.658.689	250.472.357	381.557.551,385
Sragen	267.711.820,479	297.176.332,577	304.243.647,358
Surakarta	372.798.426,790	425.502.779,064	527.538.846,221
Rata-rata	262.225.905,361	295.918.170,279	395.925.887,054

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Data diatas menunjukkan besar penerimaan PAD pada masing-masing daerah di Eks Karesidenan Surakarta, terdapat penerimaan PAD tertinggi yaitu

pada Kota Surakarta, pada tahun 2015 PAD sebesar Rp. 372.798.426.790, kemudian pada tahun 2016 Rp. 425.502.779.064 dan terus menerus meningkat hingga tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 527.538.846.220. Hal ini karena didukung dari hasil penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar pada daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah Kota Surakarta pada tahun 2015,2016, dan 2017 berturut-turut adalah Rp.233.085.404.386, Rp.252.052.998.369, dan Rp.288.417.472.037. Adapun PAD yang terkecil terdapat pada Kabupaten Klaten, ditunjukkan pada tahun 2015 PAD Kabupaten Klaten sebesar Rp. 190.622.670.128 namun pada tahun selanjutnya yaitu 2016 dan 2017 Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dan tidak lagi menjadi Kabupaten dengan PAD terendah. Pada tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten dengan PAD terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 218.604.854.600 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 333.840.434.900

Terdapat beberapa daerah yang mempunyai PAD dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 dan 2016 daerah dengan PAD dibawah rata-rata adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Kemudian terdapat perubahan pada tahun 2017, dimana daerah dengan PAD dibawah rata-rata bertambah menjadi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen

4.1.4.2 DanaPerimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom guna mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 dana perimbangan berasal dari bagi hasil pusat dan daerah yaitu PBB, BPHTB, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Tabel 4.5
Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan		
	2015	2016	2017
Boyolali	1.092.341.267,92	1.358.444.509,32	1.354.438.480,87
Klaten	1.279.990.558,283	1.573.615.108,481	1.624.715.625,119
Sukoharjo	944.640.593,0	1.246.954.770,0	1.217.877.694,0
Wonogiri	1.146.100.682,06	1.470.168.336,26	1.520.105.622,89
Karanganyar	1.035.219.914,0	1.457.330.903,0	1.388.240.795,0
Sragen	1.154.055.980,941	1.442.580.724,671	1.548.667.895,231
Surakarta	755.728.419,465	1.103.859.741,264	1.048.161.106,387
Rata-rata	1.058.296.773,667	1.378.993.441,857	1.386.029.602,785

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Data Dana Perimbangan pada tabel 4.5 di Eks Karesidenan Surakarta menampilkan bahwa dana perimbangan setiap tahunnya mengalami perubahan,

dibuktikan pada tahun 2015 dana perimbangan terbesar didapatkan oleh Kabupaten Sragen yaitu sebesar Rp. 1.154.055.980.941. Adapun dana perimbangan terbesar dari sektor dana alokasi umum (DAU), yaitu dana yang dialokasikan pemerintah pusat pada setiap daerah otonom sebagai dana pembangunan daerah. Kabupaten Sragen memiliki DAU sebesar Rp.977.443.589.000. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 dana perimbangan terbesar adalah pada Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp. 1.573.615.108.481 dan Rp. 1.624.715.625.119. Pada Kabupaten Klaten pemasukan terbesar pada dana perimbangan adalah pada sektor DAU, yaitu berturut-turut sebesar Rp.1.204.344.586.098 dan Rp.1.271.590.067.902. Adapun dana perimbangan terkecil adalah pada Kota Surakarta. Pada tahun 2015 dana perimbangan yang didapat sebesar Rp. 755.728.419.465, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.103.859.741.264, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.048.161.106.387. Berdasarkan data diatas dana perimbangan terkecil adalah pada Kota Surakarta, hal ini dikarenakan Kota Surakarta mempunyai PAD yang paling tinggi di Eks Karesidenan Surakarta.

Perhitungan rata-rata dari dana perimbangan di Eks Karesidenan Surakarta yang berasal dari APBD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Terdapat beberapa daerah yang memiliki dana perimbangan dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 daerah dengan dana perimbangan dibawah rata-rata adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 daerah dengan dana perimbangan

dibawah rata-rata adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta

4.1.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.6
Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
	2015	2016	2017
Boyolali	219.583.123,0	342.740.570,620	434.042.89,00
Klaten	707.207.496,446	460.792.113,543	585.081.231,492
Sukoharjo	525.518.280,0	321.778.378,000	373.125.930,00
Wonogiri	606.395.255,47	346.283.344,510	464.032.598,89
Karanganyar	493.715.579,0	308.404.778,000	319.092.457,00
Sragen	602.289.623,47	353.002.085,660	387.132.212,434
Surakarta	439.955.840,361	173.641.327,667	228.215.470,550
Rata-rata	513.523.599,678	329.520.371,143	398.674.684,624

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta

Berdasarkan data pada table 4.6 menunjukkan besar lain-lain pendapatan yang sah dimasing-masing daerah Eks Karesidenan Surakarta. Lain-lain pendapatan yang sah di Eks Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi yaitu

terdapat perubahan kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut dari perhitungan rata-rata pada tahun 2015 sebesar Rp 513.523.599.678, kemudian pada tahun 2016 Rp 329.520.371.143 dan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 398.674.684.624. Adapun daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terkecil yaitu pada Kabupaten Boyolali tetapi hanya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 219.583.123.000. Sedangkan ditahun 2016 dan 2017 penerimaan terkecil terjadi pada Kota Surakarta yaitu sebesar Rp. 173.641.327.667 dan Rp. 228.215.470.550. Kemudian penerimaan lain-lain pendapatan yang sah terbesar dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu Kabupaten Klaten. Pada tahun 2015 penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 707.207.496.446, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 460.792.113.543 dan pada tahun 2017 adalah Rp. 585.081.231.492. Pendapatan tersebut didukung oleh sektor bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi regional memiliki tujuan dalam usaha mencapai keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan total perkapita dengan memperhatikan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental struktur ekonomi suatu daerah yang bertujuan untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi, berbagai kebijakan yang dilakukan diantaranya dapat digolongkan sebagai kebijakan fiskal daerah atau pengelolaan keuangan daerah dengan mengontrol pendapatan dan pengeluaran melalui APBD.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangannya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengelola keuangan tersebut untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Ada beberapa indikator yang diamati yaitu struktur penerimaan, pengeluaran dan dampak terhadap pembangunan ekonomi regional. Variabel yang dipilih berdasarkan besarnya peranan terhadap kapasitas keuangan daerah dan dampak terhadap perekonomian daerah, lalu kedekatan antara hubungan variabel. Artinya variabel input dianggap sangat erat hubungannya dengan pencapaian variabel output. Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil berdasarkan perhitungan dari PDRB riil perkapita penduduk dikali dengan jumlah penduduk. PDRB menjelaskan kondisi dan dapat menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2. Presentase penduduk tidak miskin sebagai variabel yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel IPM mencerminkan tingkat keberhasilan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Adapun variabel input meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menganalisis input dan output suatu daerah. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat efisiensi mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta. Adapun hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode DEA telah diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta.

Tabel 4.7
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017 (persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat		
	2015	2016	2017
Boyolali	100	99,13	100
Klaten	100	100	91,91
Sukoharjo	97,14	100	100
Wonogiri	98,93	100	98,76
Karanganyar	100	100	100
Sragen	84,91	93,24	100
Surakarta	100	100	100
Rata-rata	97,28	98,91	98,67

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Ssurakarta (diolah)

Tabel 4.7 telah menunjukkan hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan dari data tersebut pada tahun 2015 di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa ketiga Kabupaten tersebut tidak efisien relatif 100%. Adapun masing-masing tingkat efisiensi yang ditunjukkan yaitu pada Kabupaten Sukoharjo tingkat efisiensinya sebesar 97.14%, Kabupaten Wonogiri 98,93%, kemudian Kabupaten Sragen sebesar 84,91%. Pada tahun 2016 terdapat penurunan daerah yang tidak efisien. Terdapat dua daerah yang tidak efisien relatif 100% yaitu, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Kedua daerah tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 99,13% dan 93,24%. Pada tahun 2017 terdapat dua kabupaten yang tidak efisien relatif 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Kedua daerah tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 91,91% dan 98,76%. Sementara itu, terdapat

beberapa daerah yang memiliki efisiensi relatif 100%. Pada tahun 2015 daerah dengan tingkat efisiensi relatif 100% adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2016 adalah kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Pada tahun 2017 daerah dengan tingkat efisiensi relatif 100% adalah pada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah yaitu meliputi PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang telah digunakan untuk mencapai pembangunan ekonomi masing-masing daerah dalam usaha meningkatkan PDRB, IPM, dan usaha dalam mengurangi kemiskinan sebagai output dari pembangunan ekonomi. Telah ditunjukkan pada hasil tabel 4.7 bahwa setiap tahun di Eks Karesidenan Surakarta mengalami perubahan pada daerah yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% atau inefisiensi. Pada tahun 2015 ketiga daerah yaitu Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen menunjukkan hasil yang belum efisien 100%. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan hasil olah data mengalami pengurangan menjadi dua daerah yang menunjukkan tingkat inefisiensi atau kurang dari 100% yaitu pada tahun 2016 adalah Kabupaten B o y o l a l i dan Kabupaten Sragen, Kemudian pada tahun 2017 adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan dana sektor public Eks Karesidenan Surakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi, hal ini dilihat dari rata-rata hasil efisiensi di Eks

Karesidenan Surakarta. Dari hasil rata-rata dibuktikan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu dari 97,28 menjadi 98,91, kemudian pada tahun 2017 terdapat penurunan yaitu menjadi 98,67. Penurunan dan kenaikan tingkat efisiensi memiliki selisih yang sedikit, hal ini dikarenakan sedikitnya selisih tingkat efisiensi setiap daerah.

Kemudian sejalan dengan terdapatnya inefisiensi pada sebagian daerah di Eks Karesidenan Surakarta, menurut data penelitian ini telah ditunjukkan beberapa pengelolaan keuangan yang tidak efisien, berdasarkan perhitungan dengan metode DEA telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan keuangan daerah atau dengan kata lain terdapat pengalokasian keuangan yang kurang tepat untuk pembangunan ekonomi guna meningkatkan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan, berdasarkan data-data penelitian ini yang telah diolah sebagai berikut (tabel 4.8) :

Tabel 4.8
Penggunaan Input yang Efisien pada Daerah Inefisiensi dan
Pemborosan (Rupiah)

Tahun	Kabupaten /Kota	Penggunaan Input yang Efisien			Pemborosan		
		PAD	DP	LLPS	PAD	DP	LLPS
2015	Sragen	227.312.	979.903	476.094	40.398	174.152.	126.194
		843.704	.488.73 0	.803.86 0	.976.7 40	492.170	.819.61 0
2015	Sukoharjo	304.977.	917.650	479.115	8.969.	2.698.99	46.403.
		500.760	.672.51 0	.230.69 0	991.24 0	20.490	049.310
2015	Wonogiri	208.946.	1.133.8	577.801	2.262.	12.274.7	28.594.
		549.200	25.901. 000	.007.47 0	052.00 0	81.100	248.000
2016	Sragen	277.098.	1.345.1	278.587	20.078	97.465.9	74.414.
		020.440	14.732.	.221.95	.312.1	92.100	863.710

			600	0	40		
2016	Boyolali	289.765. 400.790	1.346.6 18.912. 500	300.551 .965.43 0	2.544. 631.44 0	11.825.5 96.800	42.188. 605.190
2017	Klaten	341.661. 196.500	1.493.3 40.727. 100	368.226 .897.94 0	30.057 .242.8 10	131.374. 898.000	216.854 .333.55 0
2017	Wonogiri	329.699. 214.530	1.501.2 49.032. 500	402.502 .616.76 0	4.141. 220.37 0	18.856.5 90.400	61.529. 982.130

Sumber: Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta (diolah)

Catatan : Lampiran II

Keterangan : -PAD : Pendapatan Asli Daerah

-DP : Dana Perimbangan

-LLPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan dari hasil olah data analisis per unit (tabel 4.8), telah menunjukkan seberapa besar dana dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100%. Dari hasil yang telah diperoleh menunjukkan seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut. Pemborosan yang terjadi berdasarkan data yang sudah diolah pada tahun 2015 Kabupaten Sragen menjadi daerah yang paling rendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 84,91%, maka berdasarkan analisis DEA Kabupaten Sragen untuk mencapai tingkat efisiensi 100% hanya memerlukan

dana dari PAD sebesar Rp. 227.312.843.704, dari dana perimbangan sebesar Rp. 979.903.488.730, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 476.094.803.860. Terdapat solusi melalui hasil analisis DEA, bahwa Kabupaten Sragen harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 40.398.976.740, kemudian harus mengurangi dari dana perimbangan sebesar Rp. 174.152.492.170, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 126.194.819.610. Adapun Kabupaten lainnya yang memiliki efisiensi kurang dari relatif 100% pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai tingkat efisiensi relatif 100% hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 304.977.500.760, dari dana perimbangan sebesar Rp. 917.650.672.510, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 479.115.230.690. Terdapat solusi melalui hasil olah data analisis DEA, bahwa Kabupaten Sukoharjo harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 8.969.991.240, kemudian harus mengurangi dana perimbangan sebesar Rp. 26.989.920.490, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 46.403.049.310. Kabupaten Wonogiri dalam mencapai tingkat efisiensi relatif 100% hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 208.946.549.200, dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.133.825.901.000, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 577.801.007.470. Terdapat solusi melalui hasil olah data analisis DEA, bahwa Kabupaten Wonogiri harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 2.262.052.000, kemudian harus mengurangi dana perimbangan sebesar Rp. 12.274.781.100, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar

Rp. 28.594.248.000 hal ini dilakukan untuk meningkatkan PDRB, IPM, dan mengurangi jumlah kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi perubahan daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali, yang masing-masing memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu 99,13% dan 93,24%. Agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Sragen hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 277.098.020.440, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.345.114.732.600, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 278.587.221.950. Untuk mencapai tujuan pembangunan maka Kabupaten Sragen dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 20.078.312.140, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 97.465.992.100 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 74.414.863.710. Kemudian pada Kabupaten Boyolali untuk mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 289.765.400.790, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.346.618.912.500, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 300.551.965.430, maka Kabupaten Boyolali dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 2.544.631.440, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 11.825.596.800 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 42.188.605.190.

Pada tahun 2017 juga terjadi perubahan daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, yang masing-masing memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu 91,91% dan

98,76%. Agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Klaten hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 341.661.196.500, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.493.340.727.100, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 368.226.897.940. Untuk mencapai tujuan pembangunan maka Kabupaten Klaten dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 30.057.242.810, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 131.374.898.000 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 216.854.333.550. Kemudian pada Kabupaten Wonogiri untuk mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 329.699.214.530, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.501.249.032.500, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 402.502.616.760, maka Kabupaten Boyolali dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 4.141.220.370, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 18.856.590.400 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 61.529.982.130. Jika input dapat dikelola yaitu mengelola pendapatan dan pengalokasian dana dengan tepat serta dapat mengurangi pemborosan sesuai tabel (4.8) maka Kabupaten/ Kota di Eks Karesidenan Surakarta dapat efisien 100%. Dalam efisiensi radial atau keseluruhan tidak hanya melalui input saja, tetapi output juga berpengaruh terhadap efisiensi radial. Adapun penggunaan output yang efisien dan peningkatan agar output menjadi relatif 100%, yang ditunjukkan pada tabel (4.9).

Tabel 4.9
Penggunaan Output yang Efisien pada Daerah Inefisiensi dan Peningkatan (Rupiah)

Tahun	Kabupaten /Kota	Penggunaan Output yang Efisien			Peningkatan		
		PDRB	PPTM	IPM	PDRB	PPTM	IPM
2015	Sragen	0	0	72,7	0	0	1,6
2015	Sukoharjo	25.602.4 24.841	0	79,3	3.990.34 6.841	0	4,8
2015	Wonogiri	21.873.6 05.235	0	74,4	4.896.40 6.235	0	6,6
2016	Sragen	0	0	73,0	0	0	1,6
2016	Boyolali	21.502.2 54.293	0	0	2.369.69 8.293	0	0
2017	Klaten	25.384.9 90.371	87,6	0	464.687. 511	1,8	0
2017	Wonogiri	22.988.5 74.829	72,6	0	4.200.17 7.069	3,9	0

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta (diolah)

Berdasarkan dari hasil olah data analisis per unit (tabel 4.9), telah menunjukkan seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan jumlah PDRB, presentase jumlah penduduk tidak miskin, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang seharusnya dicapai agar efisiensi relatif 100%. Dari hasil yang telah diperoleh menunjukkan seberapa besar peningkatan yang harus dicapai terhadap PDRB, jumlah penduduk tidak miskin, dan IPM agar efisien relatif 100%. Berdasarkan tabel (4.8) yaitu dana input yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha menghasilkan output berupa PDRB, presentase jumlah penduduk tidak miskin, dan IPM yang dalam hal ini telah terindikasi tidak efisien relatif 100%, makadariitu sangat diperlukan peningkatan terhadap output yang dihasilkan.

Pada tahun 2015, terdapat tiga Kabupaten yang terindikasi tidak efisien 100%, diantaranya adalah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Berdasarkan analisis DEA, Kabupaten Sragen memiliki dua output yang sudah relatif 100% yaitu PDRB dan presentase penduduk tidak miskin (PPTM). Selanjutnya output yang tidak efisien adalah IPM. Melalui hasil olah data analisis DEA, menunjukkan pencapaian target agar efisiensi relatif 100% yaitu sebesar 72,7%. Untuk mencapai target tersebut Kabupaten Sragen perlu meningkatkan IPM sebesar 1,6%. Kabupaten Sukoharjo memiliki output yang efisien relatif 100%, yaitu presentase penduduk tidak miskin (PPTM) serta output yang tidak efisien yaitu PDRB dan IPM. Kabupaten Sukoharjo mencapai output yang efisien jika memiliki PDRB sebesar Rp. 25.602.424.841 dan IPM sebesar 79,3%. Dalam mencapai target tersebut Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan PDRB sebesar Rp. 3.990.346.841 dan meningkatkan IPM sebesar 4,8%. Dalam peningkatan PDRB, Kabupaten Sukoharjo dapat meningkatkan pada sektor Industri pengolahan, karena merupakan sektor dengan pemasukan PDRB tertinggi yaitu pada tahun 2015 mencapai Rp. 8.285.662.000. Jika sektor industri pengolahan meningkat secara signifikan setiap tahunnya maka output PDRB akan efisien relatif 100%. Adapun pada sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga berpengaruh terhadap peningkatan PDRB, karena merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi kedua yaitu sebesar Rp. 4.057.040.000. Selanjutnya pada Kabupaten Wonogiri terdapat efisiensi pada output presentase penduduk tidak miskin (PPTM) dan memiliki inefisiensi pada PDRB dan IPM. Dalam hasil analisis DEA memberi

target pada PDRB dan IPM agar efisiensi relatif 100%, yang masing-masing target sebesar Rp. 21.873.605.235 dan IPM sebesar 74,4%. Untuk menghasilkan PDRB dan IPM sesuai target, Kabupaten Wonogiri harus meningkatkan dari PDRB aktual sebesar Rp. 4.896.406.235 dan meningkatkan dari IPM aktual sebesar 6,6%. Dalam upaya peningkatan PDRB, Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, karena Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten agraris dengan mayoritas penduduk adalah petani, serta sektor tersebut merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi di Kabupaten Wonogiri, yaitu sebesar Rp. 5.477.066.910. Kabupaten Wonogiri juga dapat meningkatkan PDRB melalui sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, karena sektor tersebut merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi kedua di Kabupaten Wonogiri.

Pada tahun 2016 terdapat dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi dibawah 100%, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Sragen hanya memiliki satu output inefisiensi yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mencapai efisiensi relatif 100%, Kabupaten Sragen memerlukan IPM sebesar 73%. Agar memenuhi target 73%, Kabupaten Sragen harus meningkatkan dari IPM actual sebesar 1,6%. Selanjutnya pada Kabupaten Boyolali juga memiliki satu output yang kurang dari relatif 100%, yaitu PDRB. Hasil analisis DEA memberi target PDRB agar mencapai efisiensi relatif 100% sebesar Rp. 21.502.254.293. Untuk memenuhi target tersebut PDRB actual perlu ditingkatkan sebesar Rp. 2.369.698.293. Dalam peningkatan PDRB, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan melalui lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran, reapas mobil dan sepeda motor, karena mengingat penghasil PDRB tertinggi adalah pada sektor tersebut.

Pada tahun 2017 terdapat dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%, diantaranya adalah Kabupaten Klaten dan kabupaten Wonogiri. Masing-masing Kabupaten tersebut hanya memiliki satu output yang efisien relatif 100% yaitu IPM. Kemudian dari hasil analisis olah data DEA, menunjukkan untuk mencapai efisien relatif 100% masing-masing Kabupaten memiliki target. Kabupaten Klaten memiliki target PDRB sebesar Rp. 25.384.990.371 dan PPTM sebesar 87,6%. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Klaten perlu meningkatkan dari PDRB actual sebesar Rp. 464.687.511 dan sekaligus meningkatkan PPTM sebesar 1,8%. Dalam memenuhi syarat efisiensi 100% tersebut, Kabupaten Klaten dapat fokus pada peningkatan sektor industri pengolahan, karena sektor tersebut merupakan sektor dengan PDRB lapangan usaha terbesar di Kabupaten Klaten, yaitu sebesar Rp. 8.484.614.050. Tidak hanya pada sektor tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga merupakan penghasil PDRB tertinggi kedua di Kabupaten Klaten, yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi 100% pada output PDRB. Selanjutnya Kabupaten Wonogiri memiliki target PDRB agar mencapai efisien sebesar Rp. 22.988.574.829 dan target PPTM sebesar 72,6%. Untuk mencapai efisiensi 100%, perlu meningkatkan dari PDRB actual sebesar Rp. 4.200.177.069 dan meningkatkan PPTM sebesar 3,9%. Jika semua Kabupaten meningkatkan output sesuai dengan tabel (4.9) maka semua Kabupaten akan efisien relatif 100%.

Menurut data pada tabel (4.9) Kabupaten/ Kota di Eks Karesidenan Surakarta yang memiliki tingkat efisiensi 100% dari tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah pada Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sedangkan pada Kabupaten lainnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki inefisiensi dengan tahun yang berbeda-beda. Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta rata-rata memiliki output dengan sektor PDRB tertinggi yang sama yaitu industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pada Kabupaten Karanganyar pemasukan PDRB tertinggi adalah pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian dalam analisis penelitian ini menampilkan *efficient reference set*, yaitu untuk mencapai efisiensi 100% pada daerah yang tidak efisien dapat mengacu pada daerah-daerah yang menjadi *efficient reference set* sesuai dengan daerah yang bersangkutan dan pada periode waktu yang diteliti, berikut adalah tabel yang menunjukkan *efficient reference set*.

Tabel 4.10
Efisiensi, Efficient Reference Set dan Multiplier pada Daerah
Inefisiensi Menurut Kabupaten/Kota
Di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017

Tahun	Kabupaten/ Kota	Efisiensi (%)	Efficient Reference	Multiplier
2015	Sragen	84,91%	Klaten	0,009
			Karanganyar	0,863
			Surakarta	0,099
2015	Sukoharjo	97,41%	Karanganyar	0,506
			Surakarta	0,521
2015	Wonogiri	98,93%	Klaten	0,383

			Karanganyar	0,622
2016	Sragen	93,24%	Wonogiri	0,212
			Karanganyar	0,539
			Surakarta	0,225
2016	Boyolali	99,13%	Sukoharjo	0,149
			Wonogiri	0,608
			Surakarta	0,241
2017	Klaten	91,91%	Sragen	0,863
			Surakarta	0,150
2017	Wonogiri	98,76%	Boyolali	0,285
			Sragen	0,720

Sumber : Dalam Angka 2018, BPS, Surakarta (diolah)

Menurut analisis DEA untuk mencapai efisien relatif 100%, maka masing-masing daerah sebaiknya mengacu pada daerah yang telah ditampilkan berdasarkan tabel diatas. Pada tahun 2015 Kabupaten Sragen memiliki tingkat efisiensi hanya mencapai 84,91% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Surakarta, dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,009, 0,863 dan 0,099. Kemudian pada tahun 2016, Kabupaten Sragen memiliki peningkatan tingkat efisiensi yaitu sebesar 93,24% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Surakarta, dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,212, 0,539 dan 0,225. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output Kabupaten Sragen agar mencapai efisien relatif 100% begitupun untuk daerah-daerah lainya yang belum mencapai efisien relatif 100% dapat mencapai efisien dengan merujuk daerah lain berdasarkan multipliernya yang telah ditampilkan berdasarkan analisis DEA. Pada Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan tahun 2015 memiliki tingkat efisiensi

mendekati 100%, yaitu sebesar 97,41%. Dalam pencapaian tingkat efisiensi 100%, Kabupaten Sukoharjo perlu merujuk pada Kabupaten Karanganyar dan Surakarta, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,506 dan 0,521. Pada Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat efisiensi kurang dari 100% terjadi pada tahun 2015 dan 2017. Pada tahun 2015 Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu sebesar 98,93%. Dalam pencapaian efisiensi Kabupaten Wonogiri perlu merujuk pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,383 dan 0,622. Pada tahun 2016 Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan tingkat efisiensi hingga mencapai 100%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 98,76%. Penurunan ini dikarenakan terdapat inefisiensi terhadap pengelolaan keuangan, sehingga Kabupaten Wonogiri perlu merujuk pada Kabupaten Boyolali dan Sragen, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,285 dan 0,720. Pada tahun 2016 juga terdapat Kabupaten Boyolali yang mempunyai tingkat efisiensi kurang dari relatif 100% yaitu sebesar 99,13%, hal ini dapat diatasi dengan mengacu nilai *multiplier* pada beberapa Kabupaten. Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Surakarta, masing-masing Kabupaten memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,149, 0,608, dan 0,241. Kemudian pada tahun 2017, Kabupaten Klaten juga mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 100%, yaitu sebesar 91,91%. Dalam peningkatan tingkat efisiensi menjadi relatif 100%, Kabupaten Klaten perlu mengacu pada Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,863 dan 0,150.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) terhadap tingkat efisiensi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2017, dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Eks Karesidenan Surakarta terdapat daerah yang memiliki tingkat efisiensi pendapatan daerah relatif 100% dan dibawah relatif 100%. Daerah yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% pada tahun 2015 adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta, selanjutnya pada tahun 2016 adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta, kemudian pada tahun 2017 adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta. Daerah dengan tingkat efisiensi dibawah relatif 100% pada tahun 2015 adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen, masing-masing memiliki tingkat efisiensi sebesar 97,14%, 98,93%, dan 84,91%. Pada tahun 2016 terdapat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen yang memiliki tingkat efisiensi sebesar 99,13% dan 93,24%. Pada tahun 2017 terdapat Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 91,91 % dan 98,76%.

2. Efisiensi kurang dari relatif 100% dikarenakan adanya pemborosan terhadap pendapatan daerah. Melalui metode DEA untuk mengatasi Inefisiensi dapat menggunakan dua sisi perbaikan, yaitu dari segi input dan output. Dari segi input dapat melakukan pengurangan input baik dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, berdasarkan dengan hasil analisis DEA. Sedangkan dari segi output setiap daerah dapat meningkatkan output yaitu PDRB, IPM, dan Presentase penduduk tidak miskin. Kemudian dalam mengatasi inefisiensi dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100%, acuan tersebut berdasarkan nilai *multiplier* yang telah ditunjukkan dalam hasil analisis DEA

5.2 IMPLIKASI

Diharapkan pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% untuk mempertahankan efisiensinya. Sedangkan pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat efisiensi dibawah relatif 100% diharapkan untuk mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah (input) agar tidak terjadi pemborosan dan tepat sasaran dalam pengalokasiannya. Kemudian daerah dengan efisiensi dibawah 100% juga harus meningkatkan dari segi output yaitu PDRB, IPM, dan presentase penduduk tidak miskin, hal ini dilakukan agar tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam meningkatkan efisiensi Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo dapat merujuk pada Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.

Kemudian pada Kabupaten Wonogiri dapat merujuk pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Boyolali dapat merujuk pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Surakarta. Selanjutnya Kabupaten Klaten dapat merujuk pada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Lincoln, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah 2011-2015*. BPS Jawa Tengah
- Ega, Yanitra. 2012. "Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001-2008". *Skripsi Sarjana* (Tidak dipublikasikan). Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tri Wahyu. 2017. "Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Bali". *Skripsi Sarjana* (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Merini, Dian. 2013. "Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik di Kawasan Asia Tenggara". *Jurnal Ilmiah FEB UB*. Vol (1), No 2
- Chusnah, Saidatul. 2014. "Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)". Malang. *Jurnal Ilmiah FEB UB*. Vol (2), No 2
- Saputra, Putu Mahardika Adi. 2011. "Analysis of Technical Efficiency of Indonesian Manufacturing Industries: An Application of DEA". *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450-2887 Issue 66.
- Ismail, Idham. 2009. "Analisis Efisiensi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun 2005 – 2008 : Pendekatan Efisiensi Stochastic Frontier". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Vol (4), No 1
- Yayuk Eko Wahyuningsih, Zamzami. 2014. "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. ISSN. 2442-7411

- Susanti, Susy. 2013. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”. *Jurnal Matematika Integratif*. ISSN 1412-6184
- Oktaviana, Dewi. 2012. “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Rrangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol (10), No 2
- Erwinta Siswadi dan Nugroho. 2005. Paradigma Baru Pengukuran Efisiensi Kinerja Relatif Berbasis Pendekatan Matematik. Jakarta : *Majalah Usahawan* No. 06 Tahun XXXIV
- Muharam, Hajum. 2005. “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , II (3). pp. 80-166
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta. CIDES

Lampiran I VARIABEL INPUT DAN OUTPUT

Kabupaten/ Kota (2015)	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	PDRB	PPTM	IPM
Boyolali	260.633.637,9 3	1.092.341.267, 92	219.583.123,0	18.170.384.0 00	87,55	71,74
Klaten	190.622.670,1 28	1.279.990.558, 283	707.207.496,4 46	22.558.976.0 00	85,11	73,81
Sukoharjo	313.947.492	944.640.593,0	525.518.280,0	21.612.078.0 00	90,74	74,53
Wonogiri	211.208.601,2	1.146.100.682, 06	606.395.255,4 7	16.977.199.0 00	87,02	67,76
Karanganya r	218.658.689	1.035.219.914, 0	493.715.579,0	21.286.287.1 40	87,54	74,26
Sragen	267.711.820,4 79	1.154.055.980, 941	602.289.623,4 7	21.390.871.0 00	85,14	71,10
Surakarta	372.798.426,7 90	755.728.419,4 65	439.955.840,3 61	28.453.494.0 00	89,11	80,14

Kabupaten/ Kota (2016)	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	PDRB	PPTM	IPM
Boyolali	292.310.032,2 3	1.358.444.509, 32	342.740.570,6 20	19.132.556.0 00	87,91	72,18
Klaten	224.197.408,4 81	1.573.615.108, 481	460.792.113,5 43	23.717.931.0 00	85,54	73,97
Sukoharjo	363.163.428	1.246.954.770, 0	321.778.378,0 00	22.845.983.0 00	90,93	75,06
Wonogiri	218.604.854,6	1.470.168.336, 26	346.283.344,5 10	17.865.345.0 00	86,88	68,23
Karanganya r	250.472.357	1.457.330.903, 0	308.404.778,0 00	22.428.803.8 00	87,51	74,9
Sragen	297.176.332,5 77	1.442.580.724, 671	353.002.085,6 60	22.618.321.6 60	85,62	71,43
Surakarta	425.502.779,0 64	1.103.859.741, 264	173.641.327,6 67	29.966.373.0 00	89,12	80,76

Kabupaten/ Kota (2017)	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	PDRB	PPTM	IPM
Boyolali	388.014.880,2 1	1.354.438.480, 87	434.042.89,00	20.188.699.7 10	88,04	72,64
Klaten	371.718.439,3 06	1.624.715.625, 119	585.081.231,4 92	24.920.302.8 60	85,85	74,25
Sukoharjo	464.567.410	1.217.877.694, 0	373.125.930,0 0	24.152.939.4 80	91,25	75,56
Wonogiri	333.840.434,9	1.520.105.622, 89	464.032.598,8 9	18.788.397.7 60	87,01	68,66
Karanganya r	381.557.551,3 85	1.388.240.795, 0	319.092.457,0 0	23.665.952.0 50	87,72	75,22
Sragen	304.243.647,3 58	1.548.667.895, 231	387.132.212,4 34	23.933.252.1 70	85,98	72
Surakarta	527.538.846,2 21	1.048.161.106, 387	228.215.470,5 50	31.562.980.4 60	89,35	80,85

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

DP : Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)

LLPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah (Ribu Rupiah)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Ribu Rupiah)

PPTM : Presentase Penduduk Tidak Miskin (persen)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (persen)

Lampiran II EVALUASI PENGGUNAAN VARIABEL INPUT

Kabupaten /Kota (2015)	Tingkat Efisien	Penggunaan Input yang Efisien			Mengurangi Setiap Input	Pemborosan		
		PAD	DP	LLPS		PAD	DP	LLPS
Sukoharjo	97,14	304.97 7.500.7 60	917.650. 672.510	479.11 5.230.6 90	2,86	8.969.9 91.240	2.698.99 20.490	46.403.04 9.310
Wonogiri	98,93	208.94 6.549.2 00	1.133.82 5.901.00 0	577.80 1.007.4 70	1,07	2.262.0 52.000	12.274.7 81.100	28.594.24 8.000
Sragen	84,91	227.31 2.843.7 04	979.903. 488.730	476.09 4.803.8 60	15,09	40.398. 976.74 0	174.152. 492.170	126.194.8 19.610

Kabupaten/ Kota (2016)	Tingkat Efisien	Penggunaan Input yang Efisien			Mengurangi Setiap Input	Pemborosan		
		PAD	DP	LLPS		PAD	DP	LLPS
Boyolali	99,13	289.76 5.400.7 90	1.346.6 18.912. 500	300.551. 965.430	0,87	2.544.6 31.440	11.825. 596.80 0	42.188.605. 190
Sragen	93,24	277.09 8.020.4 40	1.345.1 14.732. 600	278.587. 221.950	6,76	20.078. 312.14 0	97.465. 992.10 0	74.414.863. 710

Kabupaten /Kota (2017)	Tingkat Efisien	Penggunaan Input yang Efisien			Mengurangi Setiap Input	Pemborosan		
		PAD	DP	LLPS		PAD	DP	LLPS
Klaten	91,9	341.66 1.196.5 00	1.493.3 40.727. 100	368.226. 897.940	8,1	30.057. 242.81 0	131.37 4.898.0 00	216.854.333 .550
Wonogiri	98,76	329.69 9.214.5 30	1.501.2 49.032. 500	402.502. 616.760	1,24	4.141.2 20.370	18.856. 590.40 0	61.529.982. 130

Lampiran III EVALUASI PENGGUNAAN OUTPUT

Kabupaten/ Kota (2015)	Tingkat Efisien	Output yang Efisien			Pening- katan Output	Peningkatan		
		PDRB	PPT M	IPM		PDRB	Pp T M	IPM
Sukoharjo	97,14	25.602.424.841	0	79,3	2,86	3.990.346.841	0	4,8
Wonogiri	98,93	21.873.605.235	0	74,4	1,07	4.896.406.235	0	6,6
Sragen	84,91	0	0	72,7	15,09	0	0	1,6

Kabupaten/ Kota (2016)	Tingkat Efisien	Output yang Efisien			Peningk- atan Output	Peningkatan		
		PDRB	PPT M	IPM		PDRB	PP T M	IPM
Boyolali	99,13	21.502.254.293	0	0	0,87	2.369.698.293	0	0
Sragen	93,24	0	0	73,0	6,76	0	0	1,6

Kabupaten/ Kota (2017)	Tingkat Efisien	Output yang Efisien			Pening- katan Output	Peningkatan		
		PDRB	PPT M	IPM		PDRB	PP T M	IPM
Klaten	91,91	25.384.990.371	87,6	0	8,09	464.687.511	1,8	0
Wonogiri	98,76	22.988.574.829	72,6	0	1,24	4.200.177.069	3,9	0

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)

DP : Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)

LLPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah (Ribuan Rupiah)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Ribuan Rupiah)

PPTM : Presentase Penduduk Tidak Miskin (persen)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (persen)

Lampiran IV HASIL OLAH DATA ANALISIS DATA ENVELOPMENT

ANALYSIS (DEA)

Table of efficiencies (radial) 2015

84.91 Sragen 97.14 Sukoharjo 98.93 Wonogiri
 100.00 Boyolali 100.00 Karanganya 100.00 Klaten
 100.00 Surakarta

Table of peer units

Peers for Unit Sragen efficiency 84.91% radial

Sragen	Klaten	Karanganya	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.009	0.863 0.099
267711820480.0 -PAD	1766820245.4	188686355460.0	36859668038.0
1154055980900.0 -DanaPerimb	11863820976.0	893318594200.0	74721073553.0
602289623470.0 -LLPS	6554878921.7	426040207500.0	43499717439.0
21390871000.0 +PDRB	209091896.0	18368499144.0	2813279960.4
85.1 +PPTM	0.8	75.5	8.8
71.1 +IPM	0.7	64.1	7.9

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 97.14% radial

Sukoharjo	Karanganya	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.506 0.521
313947492000.0 -PAD	110595309000.0	194382191760.0

944640593000.0 -DanaPerimb 523603552150.0 394047120360.0

525518280000.0 -LLPS 249716246200.0 229398984490.0

21612078000.0 +PDRB 10766384425.0 14836040416.0

90.7 +PPTM 44.3 46.5

74.5 +IPM 37.6 41.8

Peers for Unit Wonogiri efficiency 98.93% radial

Wonogiri Klaten Karanganya

ACTUAL LAMBDA 0.383 0.622

211208601200.0 -PAD 73009975697.0 135936573500.0

1146100682100.0 -DanaPerimb 490246409250.0 643579491720.0

606395255470.0 -LLPS 270866010290.0 306934997180.0

16977199000.0 +PDRB 8640264499.5 13233340735.0

87.0 +PPTM 32.6 54.4

67.8 +IPM 28.3 46.2

Peers for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

Boyolali Boyolali

ACTUAL LAMBDA 1.000

260633637930.0 -PAD 260633637930.0

1092341267900.0 -DanaPerimb 1092341267900.0

219583123000.0 -LLPS 219583123000.0

18170384000.0 +PDRB 18170384000.0

87.6 +PPTM 87.6

71.7 +IPM 71.7

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

Karanganya Karanganya

ACTUAL LAMBDA 1.000

218658689000.0 -PAD 218658689000.0

1035219914000.0 -DanaPerimb 1035219914000.0

493715579000.0 -LLPS 493715579000.0

21286287140.0 +PDRB 21286287140.0

87.5 +PPTM 87.5

74.3 +IPM 74.3

Peers for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

Klaten Klaten

ACTUAL LAMBDA 1.000

190622670130.0 -PAD 190622670130.0

1279990558300.0 -DanaPerimb 1279990558300.0

707207496450.0 -LLPS 707207496450.0

22558976000.0 +PDRB 22558976000.0

85.1 +PPTM 85.1

73.8 +IPM 73.8

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA 1.000
372798426790.0 -PAD	372798426790.0
755728419470.0 -DanaPerimb	755728419470.0
439955840360.0 -LLPS	439955840360.0
28453494000.0 +PDRB	28453494000.0
89.1 +PPTM	89.1
80.1 +IPM	80.1

Table of target values

Targets for Unit Sragen efficiency 84.91% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	267711820480.0	227312843740.0	15.1%	84.9%
-DanaPerimb	1154055980900.0	979903488730.0	15.1%	84.9%
-LLPS	602289623470.0	476094803860.0	21.0%	79.0%
+PDRB	21390871000.0	21390871000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.1	85.1	0.0%	100.0%
+IPM	71.1	72.7	2.2%	97.8%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 97.14% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	313947492000.0	304977500760.0	2.9%	97.1%

-DanaPerimb	944640593000.0	917650672510.0	2.9%	97.1%
-LLPS	525518280000.0	479115230690.0	8.8%	91.2%
+PDRB	21612078000.0	25602424841.0	18.5%	84.4%
+PPTM	90.7	90.7	0.0%	100.0%
+IPM	74.5	79.3	6.5%	93.9%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 98.93% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	211208601200.0	208946549200.0	1.1%	98.9%
-DanaPerimb	1146100682100.0	1133825901000.0	1.1%	98.9%
-LLPS	606395255470.0	577801007470.0	4.7%	95.3%
+PDRB	16977199000.0	21873605235.0	28.8%	77.6%
+PPTM	87.0	87.0	0.0%	100.0%
+IPM	67.8	74.4	9.9%	91.0%

Targets for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	260633637930.0	260633637930.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1092341267900.0	1092341267900.0	0.0%	100.0%
-LLPS	219583123000.0	219583123000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	18170384000.0	18170384000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.6	87.6	0.0%	100.0%
+IPM	71.7	71.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	218658689000.0	218658689000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1035219914000.0	1035219914000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	493715579000.0	493715579000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	21286287140.0	21286287140.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.5	87.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.3	74.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	190622670130.0	190622670130.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1279990558300.0	1279990558300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	707207496450.0	707207496450.0	0.0%	100.0%
+PDRB	22558976000.0	22558976000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.1	85.1	0.0%	100.0%
+IPM	73.8	73.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	372798426790.0	372798426790.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	755728419470.0	755728419470.0	0.0%	100.0%

-LLPS	439955840360.0	439955840360.0	0.0%	100.0%
+PDRB	28453494000.0	28453494000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	89.1	89.1	0.0%	100.0%
+IPM	80.1	80.1	0.0%	100.0%

Table of efficiencies (radial)

84.91 Sragen 97.14 Sukoharjo 98.93 Wonogiri
 100.00 Boyolali 100.00 Karanganya 100.00 Klaten
 100.00 Surakarta

Table of peer units

Peers for Unit Sragen efficiency 84.91% radial

Sragen	Klaten	Karanganya	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.009	0.863 0.099
267711820480.0 -PAD	1766820245.4	188686355460.0	36859668038.0
1154055980900.0 -DanaPerimb	11863820976.0	893318594200.0	74721073553.0
602289623470.0 -LLPS	6554878921.7	426040207500.0	43499717439.0
21390871000.0 +PDRB	209091896.0	18368499144.0	2813279960.4
85.1 +PPTM	0.8	75.5	8.8
71.1 +IPM	0.7	64.1	7.9

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 97.14% radial

Sukoharjo Karanganya Surakarta

ACTUAL LAMBDA 0.506 0.521

313947492000.0 -PAD 110595309000.0 194382191760.0

944640593000.0 -DanaPerimb 523603552150.0 394047120360.0

525518280000.0 -LLPS 249716246200.0 229398984490.0

21612078000.0 +PDRB 10766384425.0 14836040416.0

90.7 +PPTM 44.3 46.5

74.5 +IPM 37.6 41.8

Peers for Unit Wonogiri efficiency 98.93% radial

Wonogiri Klaten Karanganya

ACTUAL LAMBDA 0.383 0.622

211208601200.0 -PAD 73009975697.0 135936573500.0

1146100682100.0 -DanaPerimb 490246409250.0 643579491720.0

606395255470.0 -LLPS 270866010290.0 306934997180.0

16977199000.0 +PDRB 8640264499.5 13233340735.0

87.0 +PPTM 32.6 54.4

67.8 +IPM 28.3 46.2

Peers for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

Boyolali Boyolali

ACTUAL LAMBDA 1.000

260633637930.0 -PAD 260633637930.0

1092341267900.0 -DanaPerimb 1092341267900.0

219583123000.0 -LLPS 219583123000.0

18170384000.0 +PDRB 18170384000.0

87.6 +PPTM 87.6

71.7 +IPM 71.7

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

Karanganya Karanganya

ACTUAL LAMBDA 1.000

218658689000.0 -PAD 218658689000.0

1035219914000.0 -DanaPerimb 1035219914000.0

493715579000.0 -LLPS 493715579000.0

21286287140.0 +PDRB 21286287140.0

87.5 +PPTM 87.5

74.3 +IPM 74.3

Peers for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

Klaten Klaten

ACTUAL LAMBDA 1.000

190622670130.0 -PAD 190622670130.0

1279990558300.0 -DanaPerimb 1279990558300.0

707207496450.0 -LLPS 707207496450.0

22558976000.0 +PDRB 22558976000.0

85.1 +PPTM 85.1

73.8 +IPM 73.8

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta Surakarta

ACTUAL LAMBDA 1.000

372798426790.0 -PAD 372798426790.0

755728419470.0 -DanaPerimb 755728419470.0

439955840360.0 -LLPS 439955840360.0

28453494000.0 +PDRB 28453494000.0

89.1 +PPTM 89.1

80.1 +IPM 80.1

Table of target values

Targets for Unit Sragen efficiency 84.91% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	267711820480.0	227312843740.0	15.1%	84.9%
-DanaPerimb	1154055980900.0	979903488730.0	15.1%	84.9%
-LLPS	602289623470.0	476094803860.0	21.0%	79.0%
+PDRB	21390871000.0	21390871000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.1	85.1	0.0%	100.0%
+IPM	71.1	72.7	2.2%	97.8%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 97.14% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	313947492000.0	304977500760.0	2.9%	97.1%
-DanaPerimb	944640593000.0	917650672510.0	2.9%	97.1%
-LLPS	525518280000.0	479115230690.0	8.8%	91.2%
+PDRB	21612078000.0	25602424841.0	18.5%	84.4%
+PPTM	90.7	90.7	0.0%	100.0%
+IPM	74.5	79.3	6.5%	93.9%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 98.93% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	211208601200.0	208946549200.0	1.1%	98.9%
-DanaPerimb	1146100682100.0	1133825901000.0	1.1%	98.9%
-LLPS	606395255470.0	577801007470.0	4.7%	95.3%
+PDRB	16977199000.0	21873605235.0	28.8%	77.6%
+PPTM	87.0	87.0	0.0%	100.0%
+IPM	67.8	74.4	9.9%	91.0%

Targets for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	260633637930.0	260633637930.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1092341267900.0	1092341267900.0	0.0%	100.0%
-LLPS	219583123000.0	219583123000.0	0.0%	100.0%

+PDRB	18170384000.0	18170384000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.6	87.6	0.0%	100.0%
+IPM	71.7	71.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	218658689000.0	218658689000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1035219914000.0	1035219914000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	493715579000.0	493715579000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	21286287140.0	21286287140.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.5	87.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.3	74.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	190622670130.0	190622670130.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1279990558300.0	1279990558300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	707207496450.0	707207496450.0	0.0%	100.0%
+PDRB	22558976000.0	22558976000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.1	85.1	0.0%	100.0%
+IPM	73.8	73.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	372798426790.0	372798426790.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	755728419470.0	755728419470.0	0.0%	100.0%
-LLPS	439955840360.0	439955840360.0	0.0%	100.0%
+PDRB	28453494000.0	28453494000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	89.1	89.1	0.0%	100.0%
+IPM	80.1	80.1	0.0%	100.0%

Table of efficiencies (radial)

93.24 Sragen	99.13 Boyolali	100.00 Karanganya
100.00 Klaten	100.00 Sukoharjo	100.00 Surakarta
100.00 Wonogiri		

Table of peer units

Peers for Unit Sragen efficiency 93.24% radial

Sragen	Wonogiri	Karanganya	Surakarta	
ACTUAL	LAMBDA	0.212	0.539	0.225
297176332580.0 -PAD	46249164906.0	134983896550.0	95864958990.0	
1442580724700.0 -DanaPerimb	311036358040.0	785380894730.0		
248697479860.0				
353002085660.0 -LLPS	73261481470.0	166204682810.0	39121057664.0	
22618321660.0 +PDRB	3779684072.1	12087271298.0	6751366289.7	
85.6 +PPTM	18.4	47.2	20.1	

71.4 +IPM 14.4 40.4 18.2

Peers for Unit Boyolali efficiency 99.13% radial

Boyolali Sukoharjo Wonogiri Surakarta

ACTUAL LAMBDA 0.149 0.608 0.241

292310032230.0 -PAD 54191613374.0 132997428850.0 102576358570.0

1358444509300.0 -DanaPerimb 186071849700.0 894438547830.0

266108514920.0

342740570620.0 -LLPS 48016094431.0 210675991420.0 41859879573.0

19132556000.0 +PDRB 3409100648.5 10869131680.0 7224021964.6

87.9 +PPTM 13.6 52.9 21.5

72.2 +IPM 11.2 41.5 19.5

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

Karanganya Karanganya

ACTUAL LAMBDA 1.000

250472357000.0 -PAD 250472357000.0

1457330903000.0 -DanaPerimb 1457330903000.0

308404778000.0 -LLPS 308404778000.0

22428803800.0 +PDRB 22428803800.0

87.5 +PPTM 87.5

74.9 +IPM 74.9

Peers for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

Klaten	Klaten	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
224197408480.0 -PAD	224197408480.0	
1573615108500.0 -DanaPerimb	1573615108500.0	
460792113540.0 -LLPS	460792113540.0	
23717931000.0 +PDRB	23717931000.0	
85.5 +PPTM	85.5	
74.0 +IPM	74.0	

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

Sukoharjo	Sukoharjo	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
363163428000.0 -PAD	363163428010.0	
1246954770000.0 -DanaPerimb	1246954770000.0	
321778378000.0 -LLPS	321778378010.0	
22845983000.0 +PDRB	22845983001.0	
90.9 +PPTM	90.9	
75.1 +IPM	75.1	

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta	Surakarta	
ACTUAL	LAMBDA	1.000

425502779060.0 -PAD	425502779060.0
1103859741300.0 -DanaPerimb	1103859741300.0
173641327670.0 -LLPS	173641327670.0
29966373000.0 +PDRB	29966373000.0
89.1 +PPTM	89.1
80.8 +IPM	80.8

Peers for Unit Wonogiri efficiency 100.00% radial

Wonogiri	Wonogiri
ACTUAL	LAMBDA 1.000
218604854600.0 -PAD	218604854600.0
1470168336300.0 -DanaPerimb	1470168336300.0
346283344510.0 -LLPS	346283344510.0
17865345000.0 +PDRB	17865345000.0
86.9 +PPTM	86.9
68.2 +IPM	68.2

Table of target values

Targets for Unit Sragen efficiency 93.24% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	297176332580.0	277098020440.0	6.8%	93.2%
-DanaPerimb	1442580724700.0	1345114732600.0	6.8%	93.2%
-LLPS	353002085660.0	278587221950.0	21.1%	78.9%

+PDRB	22618321660.0	22618321660.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.6	85.6	0.0%	100.0%
+IPM	71.4	73.0	2.2%	97.9%

Targets for Unit Boyolali efficiency 99.13% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	292310032230.0	289765400790.0	0.9%	99.1%
-DanaPerimb	1358444509300.0	1346618912500.0	0.9%	99.1%
-LLPS	342740570620.0	300551965430.0	12.3%	87.7%
+PDRB	19132556000.0	21502254293.0	12.4%	89.0%
+PPTM	87.9	87.9	0.0%	100.0%
+IPM	72.2	72.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	250472357000.0	250472357000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1457330903000.0	1457330903000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	308404778000.0	308404778000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	22428803800.0	22428803800.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.5	87.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.9	74.9	0.0%	100.0%

Targets for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	224197408480.0	224197408480.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1573615108500.0	1573615108500.0	0.0%	100.0%
-LLPS	460792113540.0	460792113540.0	0.0%	100.0%
+PDRB	23717931000.0	23717931000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.5	85.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.0	74.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	363163428000.0	363163428010.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1246954770000.0	1246954770000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	321778378000.0	321778378010.0	0.0%	100.0%
+PDRB	22845983000.0	22845983001.0	0.0%	100.0%
+PPTM	90.9	90.9	0.0%	100.0%
+IPM	75.1	75.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	425502779060.0	425502779060.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1103859741300.0	1103859741300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	173641327670.0	173641327670.0	0.0%	100.0%
+PDRB	29966373000.0	29966373000.0	0.0%	100.0%

+PPTM	89.1	89.1	0.0%	100.0%
+IPM	80.8	80.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	218604854600.0	218604854600.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1470168336300.0	1470168336300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	346283344510.0	346283344510.0	0.0%	100.0%
+PDRB	17865345000.0	17865345000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	86.9	86.9	0.0%	100.0%
+IPM	68.2	68.2	0.0%	100.0%

Table of efficiencies (radial) 2016

93.24 Sragen 99.13 Boyolali 100.00 Karanganya
 100.00 Klaten 100.00 Sukoharjo 100.00 Surakarta
 100.00 Wonogiri

Table of peer units

Peers for Unit Sragen efficiency 93.24% radial

Sragen	Wonogiri	Karanganya	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.212	0.539 0.225
297176332580.0	-PAD	46249164906.0	134983896550.0 95864958990.0

1442580724700.0 -DanaPerimb 311036358040.0 785380894730.0

248697479860.0

353002085660.0 -LLPS 73261481470.0 166204682810.0 39121057664.0

22618321660.0 +PDRB 3779684072.1 12087271298.0 6751366289.7

85.6 +PPTM 18.4 47.2 20.1

71.4 +IPM 14.4 40.4 18.2

Peers for Unit Boyolali efficiency 99.13% radial

Boyolali Sukoharjo Wonogiri Surakarta

ACTUAL LAMBDA 0.149 0.608 0.241

292310032230.0 -PAD 54191613374.0 132997428850.0 102576358570.0

1358444509300.0 -DanaPerimb 186071849700.0 894438547830.0

266108514920.0

342740570620.0 -LLPS 48016094431.0 210675991420.0 41859879573.0

19132556000.0 +PDRB 3409100648.5 10869131680.0 7224021964.6

87.9 +PPTM 13.6 52.9 21.5

72.2 +IPM 11.2 41.5 19.5

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

Karanganya Karanganya

ACTUAL LAMBDA 1.000

250472357000.0 -PAD 250472357000.0

1457330903000.0 -DanaPerimb 1457330903000.0

308404778000.0 -LLPS 308404778000.0

22428803800.0 +PDRB 22428803800.0

87.5 +PPTM 87.5

74.9 +IPM 74.9

Peers for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

Klaten Klaten

ACTUAL LAMBDA 1.000

224197408480.0 -PAD 224197408480.0

1573615108500.0 -DanaPerimb 1573615108500.0

460792113540.0 -LLPS 460792113540.0

23717931000.0 +PDRB 23717931000.0

85.5 +PPTM 85.5

74.0 +IPM 74.0

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

Sukoharjo Sukoharjo

ACTUAL LAMBDA 1.000

363163428000.0 -PAD 363163428010.0

1246954770000.0 -DanaPerimb 1246954770000.0

321778378000.0 -LLPS 321778378010.0

22845983000.0 +PDRB 22845983001.0

90.9 +PPTM 90.9

75.1 +IPM 75.1

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta Surakarta

ACTUAL LAMBDA 1.000

425502779060.0 -PAD 425502779060.0

1103859741300.0 -DanaPerimb 1103859741300.0

173641327670.0 -LLPS 173641327670.0

29966373000.0 +PDRB 29966373000.0

89.1 +PPTM 89.1

80.8 +IPM 80.8

Peers for Unit Wonogiri efficiency 100.00% radial

Wonogiri Wonogiri

ACTUAL LAMBDA 1.000

218604854600.0 -PAD 218604854600.0

1470168336300.0 -DanaPerimb 1470168336300.0

346283344510.0 -LLPS 346283344510.0

17865345000.0 +PDRB 17865345000.0

86.9 +PPTM 86.9

68.2 +IPM 68.2

Table of target values

Targets for Unit Sragen efficiency 93.24% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	297176332580.0	277098020440.0	6.8%	93.2%
-DanaPerimb	1442580724700.0	1345114732600.0	6.8%	93.2%
-LLPS	353002085660.0	278587221950.0	21.1%	78.9%
+PDRB	22618321660.0	22618321660.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.6	85.6	0.0%	100.0%
+IPM	71.4	73.0	2.2%	97.9%

Targets for Unit Boyolali efficiency 99.13% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	292310032230.0	289765400790.0	0.9%	99.1%
-DanaPerimb	1358444509300.0	1346618912500.0	0.9%	99.1%
-LLPS	342740570620.0	300551965430.0	12.3%	87.7%
+PDRB	19132556000.0	21502254293.0	12.4%	89.0%
+PPTM	87.9	87.9	0.0%	100.0%
+IPM	72.2	72.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	250472357000.0	250472357000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1457330903000.0	1457330903000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	308404778000.0	308404778000.0	0.0%	100.0%

+PDRB	22428803800.0	22428803800.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.5	87.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.9	74.9	0.0%	100.0%

Targets for Unit Klaten efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	224197408480.0	224197408480.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1573615108500.0	1573615108500.0	0.0%	100.0%
-LLPS	460792113540.0	460792113540.0	0.0%	100.0%
+PDRB	23717931000.0	23717931000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	85.5	85.5	0.0%	100.0%
+IPM	74.0	74.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	363163428000.0	363163428010.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1246954770000.0	1246954770000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	321778378000.0	321778378010.0	0.0%	100.0%
+PDRB	22845983000.0	22845983001.0	0.0%	100.0%
+PPTM	90.9	90.9	0.0%	100.0%
+IPM	75.1	75.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	425502779060.0	425502779060.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1103859741300.0	1103859741300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	173641327670.0	173641327670.0	0.0%	100.0%
+PDRB	29966373000.0	29966373000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	89.1	89.1	0.0%	100.0%
+IPM	80.8	80.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	218604854600.0	218604854600.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1470168336300.0	1470168336300.0	0.0%	100.0%
-LLPS	346283344510.0	346283344510.0	0.0%	100.0%
+PDRB	17865345000.0	17865345000.0	0.0%	100.0%
+PPTM	86.9	86.9	0.0%	100.0%
+IPM	68.2	68.2	0.0%	100.0%

Table of efficiencies (radial) 2017

91.91 Klaten 98.76 Wonogiri 100.00 Boyolali
100.00 Karanganya 100.00 Sragen 100.00 Sukoharjo
100.00 Surakarta

Table of peer units

Peers for Unit Klaten efficiency 91.91% radial

Klaten	Sragen	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.863 0.150
371718439310.0 -PAD	262459006330.0	79202190171.0
1624715625100.0 -DanaPerimb	1335974770400.0	157365956790.0
585081231490.0 -LLPS	333963705320.0	34263192612.0
24920302860.0 +PDRB	20646273594.0	4738716776.3
85.8 +PPTM	74.2	13.4
74.3 +IPM	62.1	12.1

Peers for Unit Wonogiri efficiency 98.76% radial

Wonogiri	Boyolali	Sragen
ACTUAL	LAMBDA	0.285 0.720
333840434900.0 -PAD	110652966750.0	219046247790.0
1520105622900.0 -DanaPerimb	386254867610.0	1114994164900.0
464032598890.0 -LLPS	123779102670.0	278723514090.0
18788397760.0 +PDRB	5757355275.8	17231219553.0
87.0 +PPTM	25.1	61.9
68.7 +IPM	20.7	51.8

Peers for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

Boyolali	Boyolali
ACTUAL	LAMBDA 1.000

388014880210.0 -PAD	388014880210.0
1354438480900.0 -DanaPerimb	1354438480900.0
434042892000.0 -LLPS	434042892000.0
20188699710.0 +PDRB	20188699710.0
88.0 +PPTM	88.0
72.6 +IPM	72.6

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

ACTUAL	LAMBDA	1.000
Karanganya	Karanganya	
381557551390.0 -PAD	381557551390.0	
1388240795000.0 -DanaPerimb	1388240795000.0	
319092457000.0 -LLPS	319092457000.0	
23665952050.0 +PDRB	23665952050.0	
87.7 +PPTM	87.7	
75.2 +IPM	75.2	

Peers for Unit Sragen efficiency 100.00% radial

ACTUAL	LAMBDA	1.000
Sragen	Sragen	
304243647360.0 -PAD	304243647360.0	
1548667895200.0 -DanaPerimb	1548667895200.0	
387132212430.0 -LLPS	387132212430.0	

23933252170.0 +PDRB 23933252170.0

86.0 +PPTM 86.0

72.0 +IPM 72.0

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

Sukoharjo Sukoharjo

ACTUAL LAMBDA 1.000

464567410000.0 -PAD 464567410000.0

1217877694000.0 -DanaPerimb 1217877694000.0

373125930000.0 -LLPS 373125930000.0

24152939480.0 +PDRB 24152939480.0

91.3 +PPTM 91.3

75.6 +IPM 75.6

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta Surakarta

ACTUAL LAMBDA 1.000

527538846220.0 -PAD 527538846220.0

1048161106400.0 -DanaPerimb 1048161106400.0

228215470550.0 -LLPS 228215470550.0

31562980460.0 +PDRB 31562980460.0

89.3 +PPTM 89.3

80.9 +IPM 80.9

Table of target values

Targets for Unit Klaten efficiency 91.91% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	371718439310.0	341661196500.0	8.1%	91.9%
-DanaPerimb	1624715625100.0	1493340727100.0	8.1%	91.9%
-LLPS	585081231490.0	368226897940.0	37.1%	62.9%
+PDRB	24920302860.0	25384990371.0	1.9%	98.2%
+PPTM	85.8	87.6	2.0%	98.0%
+IPM	74.3	74.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 98.76% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	333840434900.0	329699214530.0	1.2%	98.8%
-DanaPerimb	1520105622900.0	1501249032500.0	1.2%	98.8%
-LLPS	464032598890.0	402502616760.0	13.3%	86.7%
+PDRB	18788397760.0	22988574829.0	22.4%	81.7%
+PPTM	87.0	87.0	0.0%	100.0%
+IPM	68.7	72.6	5.7%	94.6%

Targets for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	388014880210.0	388014880210.0	0.0%	100.0%

-DanaPerimb	1354438480900.0	1354438480900.0	0.0%	100.0%
-LLPS	434042892000.0	434042892000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	20188699710.0	20188699710.0	0.0%	100.0%
+PPTM	88.0	88.0	0.0%	100.0%
+IPM	72.6	72.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	381557551390.0	381557551390.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1388240795000.0	1388240795000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	319092457000.0	319092457000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	23665952050.0	23665952050.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.7	87.7	0.0%	100.0%
+IPM	75.2	75.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sragen efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	304243647360.0	304243647360.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1548667895200.0	1548667895200.0	0.0%	100.0%
-LLPS	387132212430.0	387132212430.0	0.0%	100.0%
+PDRB	23933252170.0	23933252170.0	0.0%	100.0%
+PPTM	86.0	86.0	0.0%	100.0%
+IPM	72.0	72.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	464567410000.0	464567410000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1217877694000.0	1217877694000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	373125930000.0	373125930000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	24152939480.0	24152939480.0	0.0%	100.0%
+PPTM	91.3	91.3	0.0%	100.0%
+IPM	75.6	75.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	527538846220.0	527538846220.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1048161106400.0	1048161106400.0	0.0%	100.0%
-LLPS	228215470550.0	228215470550.0	0.0%	100.0%
+PDRB	31562980460.0	31562980460.0	0.0%	100.0%
+PPTM	89.3	89.3	0.0%	100.0%
+IPM	80.9	80.9	0.0%	100.0%

Table of efficiencies (radial)

91.91 Klaten 98.76 Wonogiri 100.00 Boyolali
 100.00 Karanganya 100.00 Sragen 100.00 Sukoharjo

100.00 Surakarta

Table of peer units

Peers for Unit Klaten efficiency 91.91% radial

Klaten	Sragen	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA	0.863 0.150
371718439310.0 -PAD	262459006330.0	79202190171.0
1624715625100.0 -DanaPerimb	1335974770400.0	157365956790.0
585081231490.0 -LLPS	333963705320.0	34263192612.0
24920302860.0 +PDRB	20646273594.0	4738716776.3
85.8 +PPTM	74.2	13.4
74.3 +IPM	62.1	12.1

Peers for Unit Wonogiri efficiency 98.76% radial

Wonogiri	Boyolali	Sragen
ACTUAL	LAMBDA	0.285 0.720
333840434900.0 -PAD	110652966750.0	219046247790.0
1520105622900.0 -DanaPerimb	386254867610.0	1114994164900.0
464032598890.0 -LLPS	123779102670.0	278723514090.0
18788397760.0 +PDRB	5757355275.8	17231219553.0
87.0 +PPTM	25.1	61.9
68.7 +IPM	20.7	51.8

Peers for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

Boyolali	Boyolali	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
388014880210.0 -PAD	388014880210.0	
1354438480900.0 -DanaPerimb	1354438480900.0	
434042892000.0 -LLPS	434042892000.0	
20188699710.0 +PDRB	20188699710.0	
88.0 +PPTM	88.0	
72.6 +IPM	72.6	

Peers for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

Karanganya	Karanganya	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
381557551390.0 -PAD	381557551390.0	
1388240795000.0 -DanaPerimb	1388240795000.0	
319092457000.0 -LLPS	319092457000.0	
23665952050.0 +PDRB	23665952050.0	
87.7 +PPTM	87.7	
75.2 +IPM	75.2	

Peers for Unit Sragen efficiency 100.00% radial

Sragen	Sragen	
ACTUAL	LAMBDA	1.000

304243647360.0 -PAD	304243647360.0
1548667895200.0 -DanaPerimb	1548667895200.0
387132212430.0 -LLPS	387132212430.0
23933252170.0 +PDRB	23933252170.0
86.0 +PPTM	86.0
72.0 +IPM	72.0

Peers for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

Sukoharjo	Sukoharjo
ACTUAL	LAMBDA 1.000
464567410000.0 -PAD	464567410000.0
1217877694000.0 -DanaPerimb	1217877694000.0
373125930000.0 -LLPS	373125930000.0
24152939480.0 +PDRB	24152939480.0
91.3 +PPTM	91.3
75.6 +IPM	75.6

Peers for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

Surakarta	Surakarta
ACTUAL	LAMBDA 1.000
527538846220.0 -PAD	527538846220.0
1048161106400.0 -DanaPerimb	1048161106400.0
228215470550.0 -LLPS	228215470550.0

31562980460.0 +PDRB 31562980460.0

89.3 +PPTM 89.3

80.9 +IPM 80.9

Table of target values

Targets for Unit Klaten efficiency 91.91% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	371718439310.0	341661196500.0	8.1%	91.9%
-DanaPerimb	1624715625100.0	1493340727100.0	8.1%	91.9%
-LLPS	585081231490.0	368226897940.0	37.1%	62.9%
+PDRB	24920302860.0	25384990371.0	1.9%	98.2%
+PPTM	85.8	87.6	2.0%	98.0%
+IPM	74.3	74.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Wonogiri efficiency 98.76% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	333840434900.0	329699214530.0	1.2%	98.8%
-DanaPerimb	1520105622900.0	1501249032500.0	1.2%	98.8%
-LLPS	464032598890.0	402502616760.0	13.3%	86.7%
+PDRB	18788397760.0	22988574829.0	22.4%	81.7%
+PPTM	87.0	87.0	0.0%	100.0%
+IPM	68.7	72.6	5.7%	94.6%

Targets for Unit Boyolali efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	388014880210.0	388014880210.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1354438480900.0	1354438480900.0	0.0%	100.0%
-LLPS	434042892000.0	434042892000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	20188699710.0	20188699710.0	0.0%	100.0%
+PPTM	88.0	88.0	0.0%	100.0%
+IPM	72.6	72.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit Karanganyar efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	381557551390.0	381557551390.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1388240795000.0	1388240795000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	319092457000.0	319092457000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	23665952050.0	23665952050.0	0.0%	100.0%
+PPTM	87.7	87.7	0.0%	100.0%
+IPM	75.2	75.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sragen efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	304243647360.0	304243647360.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1548667895200.0	1548667895200.0	0.0%	100.0%
-LLPS	387132212430.0	387132212430.0	0.0%	100.0%

+PDRB	23933252170.0	23933252170.0	0.0%	100.0%
+PPTM	86.0	86.0	0.0%	100.0%
+IPM	72.0	72.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit Sukoharjo efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	464567410000.0	464567410000.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1217877694000.0	1217877694000.0	0.0%	100.0%
-LLPS	373125930000.0	373125930000.0	0.0%	100.0%
+PDRB	24152939480.0	24152939480.0	0.0%	100.0%
+PPTM	91.3	91.3	0.0%	100.0%
+IPM	75.6	75.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit Surakarta efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PAD	527538846220.0	527538846220.0	0.0%	100.0%
-DanaPerimb	1048161106400.0	1048161106400.0	0.0%	100.0%
-LLPS	228215470550.0	228215470550.0	0.0%	100.0%
+PDRB	31562980460.0	31562980460.0	0.0%	100.0%
+PPTM	89.3	89.3	0.0%	100.0%
+IPM	80.9	80.9	0.0%	100.0%